



**ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 27 TENTANG AKUNTANSI  
KOPERASI DAN PENGARUHNYA TERHADAP  
PERKEMBANGAN USAHA PADA KUD DI KABUPATEN  
KENDAL TAHUN 2004 -2005**

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi  
pada Universitas Negeri Semarang**

**Oleh :**

**Rakhmawati Patriatiningrum**

**NIM 3351402589**

**FAKULTAS EKONOMI  
JURUSAN AKUNTANSI**

**2007**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada :

Hari :

Tanggal :

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Agus Wahyudin, M.Si  
NIP. 131 658 236

Drs. Sukirman, Msi  
NIP. 131 967 646

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi

Drs. Sukirman, Msi  
NIP. 131 967 646

## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang pada :

Hari :

Tanggal :

Penguji Skripsi

Dra. Margunani, MP

NIP. 131 570 076

Anggota I

Anggota II

Drs. Agus Wahyudin, M.Si

NIP. 131 658 236

Drs. Sukirman, M.Si.

NIP. 131 967 646

Mengetahui :  
Dekan Fakultas Ekonomi,

Drs. Agus Wahyudin, M.Si

NIP. 131 658 236

## **PERNYATAAN**

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 17 April 2007

Rakhmawati P  
NIP 3351402589

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Tiada untaian kata yang sanggup terucap ketika hari yang dinantikan tiba, hanya kata syukur yang mampu terucap setelah mimpi itu dapat terwujud.*

- ❖ *Jika kamu dapat bermimpi, kamu pasti dapat mewujudkannya “if you can dream it, you can do it”.*
- ❖ *Pengalaman adalah pelajaran yang paling berharga dalam hidup ini.*
- ❖ *Berdoalah pada Allah. Karena sesungguhnya doa memberikan kekuatan pada orang yang lemah, membuat orang tidak percaya menjadi percaya dan memberikan keberanian pada orang yang ketakutan.*

*Kupersembahkan karyaku ini untuk:*

- ❖ *Yang selalu kusayangi Ayah dan Ibu ku terima kasih atas segalanya.*
- ❖ *Kakak-kakaku tercinta terima kasih dukungan dan perhatiannya.*
- ❖ *Dody Arifianto terima kasih selalu memberikan motivasi.*
- ❖ *Teman-teman seperjuanganku yang banyak memberikan semangat untuk selalu berusaha.*
- ❖ *Semua pihak terima kasihku yang tak terhingga telah memberikan banyak bantuan.*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “ Analisis Penerapan PSAK No. 27 tentang Akuntansi Koperasi dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Usaha Pada KUD di kabupaten Kendal Tahun 2004 – 2005.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program strata 1 (S1) pada Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Semarang.

Dalam penyusunan Skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Bersamaan dengan hal tersebut penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sudjono Sastroatmodjo, M.Si. Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Bapak Drs. Agus Wahyudin, M.Si. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang dan selaku Pembimbing I yang dengan sabar dan penuh pengertian telah memberikan arahan serta masukan sehingga skripsi ini dapat selesai.
3. Bapak Drs. Sukirman, M.Si. Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Semarang dan selaku Pembimbing II yang dengan sabar dan penuh pengertian telah memberikan arahan serta masukan sehingga skripsi ini dapat selesai.

4. Ibu Dra. Margunani, MP. Selaku Penguji skripsi yang dengan sabar dan penuh pengertian telah memberikan arahan dan masukan sehingga skripsi ini dapat selesai.
5. Bapak Ketua seluruh KUD di Kabupaten Kendal yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian pada KUD di Kabupaten Kendal
6. Untuk semua keluarga terutama Ayah, Ibu, dan saudaraku yang telah memberikan banyak perhatian selama masa penulisan Skripsi.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan, semangat dan motivasi dalam kehidupan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan Skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal itu disebabkan karena terbatasnya pengetahuan dan sempitnya pengalaman penulis. Harapan penulis semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca demi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 17 April 2007

Penulis

## ABSTRAK

**Rakhmawati Patriatiningrum.** 2007. *Analisis Penerapan PSAK No 27 tentang Akuntansi Koperasi dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Usaha pada KUD di Kabupaten Kendal Tahun 2004-2005*. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. UNNES. Pembimbing I. Drs. Agus Wahyudin, M.Si, Pembimbing II. Drs. Sukirman, M.Si. 85 hal.

**Kata Kunci: Akuntansi Koperasi, Perkembangan usaha, KUD Kabupaten Kendal.**

Perkembangan usaha koperasi dapat dilihat dari perkembangan omset usaha, aktiva maupun SHU merupakan indikator berhasilnya koperasi dalam menjalankan usahanya. Banyak faktor yang menentukan keberhasilan koperasi, salah satunya adalah dari faktor sumber daya manusianya. Yang menjadi permasalahannya, bagaimana penerapan PSAK pada KUD di Kabupaten Kendal tahun 2004-2005. Adakah pengaruh yang nyata terhadap perkembangan usahanya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan PSAK, perkembangan usaha dan pengaruh penerapan PSAK terhadap perkembangan usaha pada KUD di Kabupaten Kendal.

Populasi penelitian ini sebanyak 18 KUD. Adapun variabel yang diteliti meliputi penerapan PSAK sebagai variabel bebas dan perkembangan usaha sebagai variabel terikat. Data diperoleh melalui dokumentasi dan interviu terstruktur. Data dianalisis menggunakan regresi linier sederhana.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Koperasi No. 27 pada KUD di Kabupaten Kendal sudah baik. Dari 18 KUD yang diteliti sebanyak 66,7% baik dan 27,8% dalam kategori sangat baik. Perkembangan usaha pada KUD di Kabupaten Kendal tahun 2004-2005 masih rendah, terbukti dari 27,8% KUD memiliki perkembangan usaha yang sangat rendah dan 22,2% dalam kategori rendah, sebanyak 22,2% cukup, hanya 11,1% yang memiliki perkembangan usaha tinggi dan 16,7% tinggi. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Koperasi No. 27 berpengaruh terhadap perkembangan usaha pada KUD di Kabupaten Kendal, terbukti dari hasil uji F diperoleh  $p \text{ value} = 0,008 < 0,05$ .

Dapat diambil simpulan bahwa penerapan PSAK pada KUD di Kabupaten Kendal sudah baik. Penerapan PSAK berpengaruh positif terhadap perkembangan usaha. Dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan pada penerapan PSAK No. 27 tentang Akuntansi Koperasi terhadap perkembangan usaha pada KUD di Kabupaten Kendal. Saran yang disampaikan adalah bagi KUD yang perkembangan usahanya masih dalam kategori rendah hendaknya untuk penyusunan laporan keuangan diharapkan dengan berpedoman pada standar khusus untuk Koperasi yaitu dengan menerapkan PSAK No. 27 tentang Akuntansi Koperasi yang nantinya akan meningkatkan perkembangan usaha disamping itu anggota ataupun masyarakat umum akan lebih percaya dengan Koperasi karena hasil dari kegiatan usahanya dapat berkembang lebih maju.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN .....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
BAB I       PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	6
1.2 Permasalahan .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	7
1.3.2 Kegunaan Penelitian .....	7
BAB II       LANDASAN TEORI DAN HIPOTENSI .....	9
2.1 Koperasi .....	9
2.2 Koperasi Unit Desa .....	11
2.2.1 Pengertian Koperasi Unit Desa .....	11

2.2.2	Aspek dan Jenis-jenis Usaha Koperasi Unit	
	Desa (KUD) .....	12
2.2.2.1	Aspek Usaha .....	12
2.2.2.2	Jenis-jenis Usaha KUD .....	13
2.3	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan koperasi .....	14
2.3.1	Pengertian Standar Akuntansi Keuangan	
	Koperasi .....	14
2.3.2	Unsur-unsur dalam Pernyataan Standar	
	Akuntansi Keuangan Koperasi.....	15
2.3.3	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan	
	Yang Fleksibel .....	26
2.4	Perkembangan Usaha.....	33
2.4.1	Pengertian Perkembangan Usaha.....	33
2.4.2	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi	
	Perkembangan Usaha.....	34
2.4.3	Strategi dan Program-program dalam	
	Pengembangan Usaha Koperasi.....	36
2.4.4	Cara Mengukur Perkembangan Usaha.....	37
2.4.5	Kendala-kendala Usaha Yang Dihadapi	
	Koperasi .....	39
2.4.6	Cara Mengatasi Kendala-Kendala Usaha Yang	
	Dihadapi Dalam Koperasi .....	41
2.4.7	Usaha Yang Sehat pada Koperasi .....	42

	2.5 Kerangka Berpikir.....	43
	2.6 Hipotesis.....	47
BAB III	METODE PENELITIAN .....	48
	3.1 Populasi Penelitian .....	49
	3.2 Sempel Penelitian .....	49
	3.3 Variabel Penelitian .....	49
	3.4 Metode Pengumpulan Data .....	50
	3.5 Metode Analisis Data .....	51
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	60
	4.1 Hasil Penelitian .....	60
	4.1.1 Gambaran Umum Variabel Penelitian .....	60
	4.1.1.1 Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Koperasi No. 27 pada KUD di Kabupaten Kendal .....	60
	4.1.1.2 Perkembangan Usaha .....	70
	4.1.2 Pengujian Hipotensis .....	73
	4.1.2.1 Uji Prasyarat .....	73
	4.1.2.2 Analisis Regresi .....	75
	4.2 Pembahasan .....	77
BAB V	PENUTUP .....	82
	5.1 Simpulan .....	82
	5.2 Saran .....	82
	DAFTAR PUSTAKA .....	84
	LAMPIRAN.....	85

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Daftar KUD di Kabupaten Kendal.....	48
Tabel 2	Tabel 3 Kriteria Penerapan PSAK Koperasi.....	52
Tabel 3	Kriteria Perkembangan Omzet Usaha.....	54
Tabel 4	Kriteria Perkembangan Aktiva.....	55
Tabel 5	Kriteria Perkembangan SHU .....	56
Tabel 6	Analisis Varians .....	57
Tabel 7	Gambaran Umum Penerapan PSAK NO. 27 pada KUD di Kabupaten Kendal.....	60
Tabel 8	Gambaran Umum Penerapan PSAK NO. 27 pada Indikator Konsep Penyusunan Laporan Keuangan pada KUD di Kabupaten Kendal.....	61
Tabel 9	Distribusi Frekuensi Penyajian Laporan Keuangan pada KUD di Kabupaten Kendal.....	62
Tabel 10	Gambaran Umum Penerapan PSAK NO. 27 pada Indikator Konsep Aktiva pada KUD di Kabupaten Kendal .....	63
Tabel 11	Distribusi Frekuensi Penyajian Konsep Aktiva .....	64
Tabel 12	Gambaran Umum Penerapan PSAK NO. 27 pada Indikator Konsep Kewajiban pada KUD di Kabupaten Kendal.....	65
Tabel 13	Distribusi Frekuensi Penyajian Konsep Kewajiban.....	65
Tabel 14	Gambaran Umum Penerapan PSAK NO. 27 pada Indikator Konsep Ekuitas pada KUD di Kabupaten Kendal .....	66
Tabel 15	Distribusi Frekuensi Penyajian Konsep Ekuitas .....	67

Tabel 16 Gambaran Umum Penerapan PSAK NO. 27 pada Indikator Konsep Pendapatan dan Beban .....	68
Tabel 17 Distribusi Frekuensi Penyajian Konsep Pendapatan dan Beban.....	69
Tabel 18 Gambaran Umum Perkembangan Omzet Usaha .....	71
Tabel 19 Gambaran Umum Perkembangan Aktiva .....	71
Tabel 20 Gambaran Umum Perkembangan SHU .....	72
Tabel 21 Gambaran Umum Perkembangan Usaha .....	73
Tabel 22 Hasil Uji Normalitas Data.....	74
Tabel 23 Hasil Uji Linieritas.....	74
Tabel 24 Hasil Analisis Regresi.....	76
Tabel 25 Hasil Uji F.....	76
Tabel 26 Koefisien Determinasi .....	77

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Berpikir .....	47
Gambar 2 Perkembangan Usaha .....	70
Gambar 3 Scater Plot Heteroskedastis .....	75

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Operasional Variabel Penelitian
- Lampiran 2 Bidang Usaha KUD di Kabupaten Kendal
- Lampiran 3 Check List
- Lampiran 4 Data Laporan Keuangan pada KUD di Kabupaten Kendal
- Lampiran 5 Data Skor Penerapan PSAK No. 27 tentang Akuntansi Koperasi  
Pada KUD di Kabupaten Kendal
- Lampiran 6 Data Persiapan Analisis Regresi
- Lampiran 7 Uji Normalitas Data
- Lampiran 8 Regression
- Lampiran 9 Histogram
- Lampiran 10 Surat Ijin Penelitian

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan Nasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah pembangunan manusia seutuhnya yang bertujuan untuk mewujudkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pemerintah secara tegas menetapkan bahwa dalam rangka pembangunan nasional dewasa ini, koperasi harus menjadi tulang punggung dan wadah bagi perekonomian rakyat. Kebijakan Pemerintah tersebut sesuai dengan isi UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Di dalam penjelasan UUD 1945 tersebut diungkapkan bahwa bangun usaha yang sesuai adalah koperasi. Oleh karena itu, peran koperasi menjadi penting berkaitan dengan pelaksanaan tujuan di atas. Koperasi harus tampil sebagai organisasi yang dapat mengumpulkan dan membentuk kekuatan ekonomi bersama-sama agar dapat meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Perkembangan usaha koperasi sekarang ini masih jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan perkembangan usaha swasta lainnya. Hal ini disebabkan adanya masalah-masalah yang dihadapi koperasi, terutama aspek kelembagaan dan aspek usaha. Untuk kelancaran perkembangan usaha koperasi diperlukan adanya pengelolaan yang profesional memerlukan adanya sistem pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang lengkap dengan

berdasarkan pedoman yang sudah distandarkan khusus untuk koperasi dan informasi yang relevan serta dapat diandalkan.

Pedoman untuk koperasi dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap organisasi koperasi dalam menerapkan Standar Akuntansi khusus untuk Koperasi sehingga dapat terbentuk suatu struktur yang sistematis dalam pengembangan usaha koperasi yang mengacu pada prinsip-prinsip koperasi. Pedoman ini sekaligus dimaksudkan untuk menjadi acuan baik dalam pembinaan maupun penilaian pelaksanaan kinerja organisasi koperasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan koperasi. Dengan Standar Akuntansi khusus untuk Koperasi diharapkan akan lebih meningkatkan partisipasi anggota, karena masyarakat / anggota lebih mampu memprediksi kinerja koperasi dan sekaligus merasakan adanya transparansi dalam pengelolaan kegiatan usahanya.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Koperasi merupakan Standar Akuntansi khusus untuk Koperasi yang menyajikan informasi mengenai data keuangan dari suatu badan usaha untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Standar ini menyajikan informasi data keuangan secara sistematis yang meliputi kegiatan-kegiatan pengumpulan bukti, pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisisan data keuangan.

Agar penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Koperasi dapat benar-benar terlaksana, maka dalam koperasi perlu adanya sistem pengendalian intern. Dilaksanakannya sistem pengendalian intern pada Koperasi dimaksudkan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya

kebijakan manajemen. Sistem pengendalian intern yang baik akan menjamin kekayaan para investor dan kreditur yang ditanamkan dalam koperasi dan akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya.

KUD adalah suatu organisasi ekonomi yang berwatak sosial dan merupakan pusat pelayanan kegiatan perekonomian yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat itu sendiri guna meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Seperti halnya badan usaha lainnya koperasi juga memerlukan adanya sistem akuntansi.

Akuntansi merupakan suatu proses pencatatan dan pengolahan data-data keuangan sehingga menjadi laporan keuangan yang berguna bagi para pemakai untuk pengambilan keputusan ekonomisnya. Dalam hal ini akuntansi berperan dalam penyediaan informasi keuangan organisasi, dimana informasi ini dapat berfungsi sebagai media pertanggungjawaban dan sekaligus dapat digunakan untuk menilai kinerja dan manajemen. Untuk itu dalam koperasi harus disusun suatu sistem informasi akuntansi yang memadai.

Sistem informasi akuntansi ini nantinya harus mampu menghasilkan informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan yang telah distandarisasi oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 Tahun 1999 tentang Akuntansi Koperasi. Laporan keuangan yang seharusnya tersedia berdasarkan PSAK ini terdiri dari Neraca, Perhitungan Hasil Usaha (PHU), Laporan Arus Kas, Laporan Promosi Ekonomi Anggota, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Standar Akuntansi Keuangan Koperasi dikeluarkan oleh Pemerintah pada tanggal 1 April 1999 dan pelaksanaannya

pada tanggal 1 Juni 1999. Tujuan Pemerintah mengeluarkan Standar Akuntansi Keuangan Koperasi No. 27 Tahun 1999 adalah untuk membantu koperasi dalam menghadapi persaingan bisnis (dunia usaha) terutama dalam hal mengembangkan usaha koperasi.

Keterbatasan pengetahuan manajemen mengakibatkan kesulitan untuk menganalisis lingkungan usaha, ketidakmampuan dalam mengidentifikasi peluang-peluang yang ada dalam lingkungan, sehingga pada akhirnya akan menemui kesulitan dalam menyusun perencanaan, khususnya perencanaan dalam keuangan. Kurangnya tenaga terampil akan mengakibatkan tidak teraturnya sistem pembukuan.

Ada anggapan bahwa koperasi adalah organisasi yang berwatak sosial, sehingga dalam hal ini yang perlu diutamakan bukan hanya keberhasilan usahanya, tetapi yang perlu diperhatikan sumber daya manusianya. Kenyataannya bahwa Koperasi yang ada di Kabupaten Kendal dalam menunjukkan keberhasilan koperasi sangat ditentukan oleh para pengelola koperasi, baik badan pengurus maupun karyawannya. Dari alasan-alasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menentukan keberhasilan koperasi adalah penyusunan laporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi dan kualitas sumber daya manusianya yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap perkembangan usaha koperasi.

Agar dapat mengetahui sudah sesuai atau belum penyusunan laporan keuangan koperasi dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Koperasi No. 27 Tahun 1999 pada KUD di Kabupaten Kendal diperlukan evaluasi atas

hasil dan proses kegiatan akuntansi. Yang dimaksud dengan hasil dan proses kegiatan akuntansi antara lain laporan keuangan, penjelasan pos-pos neraca dan bukti-bukti pendukungnya.

Mengingat pentingnya Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Koperasi pada KUD dalam meningkatkan perkembangan usaha koperasi, maka peneliti memandang perlu untuk menganalisisnya dengan mengambil judul : “analisis penerapan PSAK no. 27 tentang Akuntansi Koperasi dan pengaruhnya terhadap perkembangan usaha pada KUD di Kabupaten Kendal tahun 2004-2005”, karena :

1. Koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang yang berbadan hukum harus melandaskan kegiatannya sesuai dengan prinsip koperasi mempunyai tanggungjawab untuk melakukan administrasi pembukuan atas segala transaksi keuangan yang terjadi dengan menyusun laporan keuangan antara lain menyusun neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota, dan catatan atas laporan keuangan.
2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Koperasi adalah teknik pembukuan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan setiap koperasi. Dengan diterapkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Koperasi sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan diharapkan koperasi dapat lebih meningkatkan usahanya dan dapat terhindar dari praktek-praktek yang tidak sehat terutama yang berhubungan dengan kekayaan yang akan merugikan koperasi.

3. Koperasi dapat dikatakan berhasil bisa dilihat dari pengelolaan dalam hal administrasi yang benar-benar sesuai dan relevan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Koperasi. Dengan dikelolanya administrasi yang baik diharapkan dapat meningkatkan perkembangan usaha, karena dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk menilai keberhasilan atau prestasi manajemen koperasi dalam menjalankan usahanya.

## **1.2 Permasalahan**

Sebagai suatu badan usaha koperasi dalam menjalankan bidang usahanya perlu menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 tentang Akuntansi Koperasi karena sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan, hal ini berkaitan erat dalam meningkatkan perkembangan usaha agar lebih maksimal.

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Koperasi No. 27 pada KUD di Kabupaten Kendal ?
2. Bagaimanakah perkembangan usaha pada KUD di Kabupaten Kendal tahun 2004-2005 ?
3. Adakah pengaruh penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Koperasi No. 27 terhadap perkembangan usaha pada KUD di Kabupaten Kendal ?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Bagaimana penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Koperasi No. 27 pada KUD di Kabupaten Kendal.
2. Bagaimana hasil perkembangan usaha pada KUD di Kabupaten Kendal tahun 2004-2005.
3. Pengaruh penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Koperasi No. 27 terhadap perkembangan usaha pada KUD di Kabupaten Kendal.

#### 1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu

- a. Kegunaan praktis
  1. Pengurus koperasi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan perkembangan usaha sehingga tujuan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya akan tercapai.
  2. Masyarakat, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat agar lebih berpartisipasi secara aktif dalam memajukan pertumbuhan ekonomi koperasi.

b. Kegunaan akademis

1. Peneliti, dapat digunakan sebagai sarana untuk menelaah sejauh mana fungsi pengetahuan yang telah diberikan dibandingkan dengan penerapan ilmu dalam praktek.
2. Menambah khasanah bacaan sekaligus sebagai bahan kajian lebih lanjut terutama bagi mahasiswa Universitas Negeri Semarang.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 KOPERASI**

##### **2.1.1 Pengertian Koperasi**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang diberikan pengertian Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Tujuan utama pendirian suatu koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.

Koperasi untuk dapat mewujudkan tujuan yang dicita-citakan dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekarang ini berbagai macam usaha telah dikembangkan dan terdapat berjenis-jenis koperasi yang terbagi menjadi 5 golongan, yaitu :

##### **1. Koperasi Konsumsi**

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang beranggotakan orang-orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi. Koperasi konsumsi mempunyai fungsi sebagai penyalur tunggal barang-

barang kebutuhan sehari-hari yang memperpendek jarak antara produsen ke konsumen, harga barang sampai ditangan pemakai menjadi lebih murah, ongkos-ongkos penjualan maupun pembelian dapat dihemat.

## 2. Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah Koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat, tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. Ada berbagai tujuan diadakannya koperasi kredit yaitu: membantu keperluan anggota dengan syarat ringan, mendidik anggota agar giat menyimpan sehingga membentuk modal sendiri, mendidik anggota untuk hidup hemat, menambah pengetahuan tentang perkoperasian.

## 3. Koperasi Produksi

Koperasi produksi adalah koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota koperasi. Tujuan dari koperasi produksi untuk membantu para pengusaha kecil yang kekurangan modal untuk dapat berkembang dan menjangkau daerah pemasaran dan koperasi sebagai penyalur.

## 4. Koperasi Jasa

Koperasi jasa adalah koperasi yang berusaha dibidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum.tujuan dari

koperasi jasa untuk memberikan pelayanan yang mudah kepada para anggota atau masyarakat.

#### 5. Koperasi Serba usaha

Koperasi serba usaha adalah koperasi yang menyelenggarakan usaha lebih dari satu macam kebutuhan ekonomi atau kepentingan ekonomi para anggotanya. Tujuan diadakannya koperasi serba usaha ini agar anggota dan masyarakat lebih tertarik untuk berpartisipasi untuk lebih meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Koperasi jenis ini adalah KUD, KSU dan Koperasi yang ada dilingkungan karyawan (Widiyanti 2003:49)

Dengan beragam jenis usaha koperasi yang tengah berkembang diharapkan dapat membantu untuk lebih meningkatkan kesejahteraan anggota dan koperasi dapat lebih memberi manfaat pada masyarakat umum.

## **2.2 Koperasi Unit Desa**

### 2.2.1 Pengertian Koperasi Unit Desa

Koperasi Unit Desa adalah suatu organisasi ekonomi yang berwatak sosial dan merupakan pusat pelayanan kegiatan perekonomian yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat itu sendiri guna meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya (Pengetahuan Perkoperasian 1980:122). Koperasi Unit Desa adalah organisasi ekonomi yang merupakan wadah bagi pengembangan kegiatan perekonomian masyarakat pedesaan itu sendiri serta

memberikan pelayanan kepada anggotanya dan masyarakat pedesaan (Aziz 1984: 30). Koperasi Unit Desa adalah koperasi pedesaan yang serba usaha dan merupakan pusat pelayanan yang memiliki berbagai fungsi dan dimungkinkan pula menangani berbagai komoditi (Sukoco 1985:45). Dari berbagai pendapat mengenai pengertian Koperasi Unit Desa tersebut di atas, maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan Koperasi Unit Desa adalah suatu organisasi ekonomi yang berwatak sosial dan merupakan wadah bagi perekonomian bagi masyarakat itu sendiri. Watak sosial yang dimaksud dalam koperasi adalah bahwa koperasi melayani kebutuhan anggota dan masyarakat dengan usaha bersama, walaupun untuk mendapatkan barang tersebut keuntungan yang di dapat hanya kecil.

## 2.2.2 Aspek dan Jenis – Jenis Usaha Koperasi Unit Desa (KUD)

### 2.2.2.1 Aspek Usaha

Aspek usaha meliputi usaha-usaha yang dilakukan oleh KUD.

Usaha-usaha yang terdapat dalam KUD adalah :

#### 1. Usaha Program

Usaha program adalah usaha-usaha yang berkaitan dengan fasilitas pemerintah. Usaha-usaha program terdiri dari pengadaan pangan, gula tani, kredit usaha tani (KUT), kelistrikan dan iuran TV.

#### 2. Usaha Non Program

Usaha non program adalah usaha-usaha yang dilakukan secara swadaya oleh KUD. Usaha-usaha non program meliputi warung

serba ada (waserda), penyaluran pupuk, pengadaan palawija, jasa angkutan dan pengadaan ternak.

#### 2.2.2.2 Jenis – Jenis Usaha KUD

KUD termasuk jenis koperasi serba usaha yang usahanya mempunyai kaitan langsung dengan kepentingan ekonomi para anggotanya. Koperasi serba usaha adalah koperasi yang menjalankan beberapa macam usaha sesuai dengan keperluan masyarakat dan lingkungannya. Jenis-jenis usaha yang diselenggarakan oleh KUD adalah :

1. Usaha Perkreditan (Usaha Simpan Pinjam)

KUD menyelenggarakan kegiatan menyimpan, menyediakan dan mengusahakan pinjaman atau kredit bagi anggota-anggotanya dalam membantu keperluan kredit bagi yang sangat membutuhkan dengan syarat-syarat yang ringan.

2. Usaha Penyediaan dan Penyaluran Sarana – Sarana Produksi dan Barang-Barang Konsumsi.

KUD menjalankan kegiatan menyediakan barang-barang kebutuhan para petani seperti bibit tanaman, pupuk, obat hama penyakit dan prasarana produksi dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian serta barang kebutuhan sehari-hari para petani dan keluarganya sehingga mendidik petani untuk berorganisasi secara koperatif untuk mengatasi kesulitan.

### 3. Usaha Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi

Dengan mengadakan pengolahan barang atau memproduksi barang berarti koperasi berfungsi sebagai produksi dan bila KUD memasarkan hasil produksinya baik kepada anggota maupun masyarakat umum maka KUD berfungsi sebagai koperasi penjualan.

### 4. Usaha Bidang Jasa

KUD memberikan pelayanan dibidang jasa pada anggota khususnya dan masyarakat sekitarnya. Ada bermacam-macam jasa yang dapat diberikan oleh KUD, misalnya jasa angkutan penumpang, jasa listrik pedesaan, jasa penggilingan padi, jasa warung telekomunikasi (wartel) dan lain-lain (Pengetahuan Perkoperasian 1980:108-122).

## **2.3 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Koperasi**

### 2.3.1 Pengertian Standar Akuntansi Keuangan Koperasi

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Koperasi merupakan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan koperasi. Secara umum Pernyataan Standar Akuntansi di Indonesia merupakan himpunan prinsip, prosedur, metode dan teknik akuntansi yang digunakan untuk mengolah data yang berhubungan dengan usaha suatu perusahaan dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur dan lembaga-lembaga pemerintah untuk menilai hasil operasi perusahaan (Harahap 2003 : 69).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Koperasi yang dimaksud dalam koperasi adalah prosedur, metode, dan teknik akuntansi yang mengatur penyusunan laporan keuangan koperasi sebagai laporan pertanggungjawaban pengurus terhadap anggota koperasi (Tugiman 1996:12). Pernyataan Standar Akuntansi khusus untuk koperasi diharapkan dapat mendorong agar koperasi dapat lebih berkembang dan pada akhirnya akan menunjang perekonomian Indonesia

### 2.3.2 Unsur-unsur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Koperasi

Adapun unsur-unsur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 tentang Akuntansi Koperasi meliputi:

#### a. Penerapan Konsep Laporan Keuangan

##### 1. Pengertian Konsep Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan koperasi adalah laporan keuangan yang disusun untuk dapat menggambarkan posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas perusahaan secara keseluruhan sebagai pertanggungjawaban pengurus atas pengelolaan keuangan koperasi yang terutama ditujukan kepada anggota.

##### 2. Pengakuan dan Pengukuran Konsep Laporan Keuangan

Dalam PSAK No. 27 paragraf 74 laporan keuangan koperasi terdiri dari neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan disajikan secara komparatif berurutan untuk dua periode akuntansi terakhir. Neraca disusun untuk

menggambarkan posisi keuangan koperasi pada waktu tertentu yang terdiri dari unsur aktiva, kewajiban dan ekuitas (PSAK No. 27 paragraf 75). Laporan perhitungan sisa hasil usaha harus memuat hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non-anggota (PSAK No. 27 paragraf 76). Laporan hasil usaha disajikan dengan memisahkan pos penghasilan dan beban yang berasal dari kegiatan yang diselenggarakan untuk anggota dan bukan anggota. Pos penghasilan dan beban yang berasal dari kegiatan penunjang lainnya serta laba rugi yang timbul dari transaksi yang bersifat luar biasa. Laporan arus kas disusun dengan tujuan memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas atau setara kas dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Laporan arus kas ini akan membantu para investor, kreditur, dan pemakai lainnya untuk menilai kemampuan perusahaan untuk memasukkan kas di masa yang akan datang, untuk memenuhi kewajibannya membayar deviden dan keperluan dana untuk kegiatan ekstern, untuk membedakan antara laba bersih dan dikaitkan dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Untuk menilai pengaruhnya investasi baik kas maupun bukan kas dan transaksi keuangan lainnya terhadap posisi keuangan perusahaan selama satu periode tertentu (Harahap 2003:243).

Laporan promosi ekonomi anggota dalam hal sisa hasil usaha pada tahun berjalan belum dibagi, maka manfaat ekonomi yang

diperoleh dari pembagian sisa hasil usaha pada akhir tahun buku dapat dicatat sebesar taksiran jumlah sisa hasil usaha yang akan dibagi untuk anggota (PSAK No. 27 paragraf 79). Adapun laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu. Laporan promosi ekonomi anggota mencakup empat unsur yaitu manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama, manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengelolaan bersama, manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi, manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha (PSAK No. 27 paragraf 80). Catatan atas laporan keuangan disusun dengan maksud untuk mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan, rincian dan penjelasan masing-masing pos laporan keuangan serta informasi tambahan lainnya yang diperlukan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut atas pos laporan keuangan tertentu.

## b. Penerapan Konsep Aktiva

### 1. Pengertian Konsep Aktiva

Menurut APB Statement No. 4 aktiva adalah sumber-sumber ekonomi perusahaan yang diakui dan diukur sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, termasuk beban tangguhan tertentu yang tidak terbentuk sumber ekonomi. Sedangkan menurut FABS aktiva

adalah manfaat ekonomi yang mungkin terjadi dimasa mendatang yang diperoleh atau dikendalikan oleh suatu lembaga tertentu sebagai akibat transaksi atau peristiwa masa lalu (Chariri 2000:138-139)

Dari kedua perbedaan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sesuatu dianggap sebagai aktiva apabila dapat memberikan kekayaan pada perusahaan atau koperasi dimasa yang akan datang.

## 2. Pengakuan dan Pengukuran Konsep Aktiva

Menurut PSAK No. 27 paragraf 63 Penyajian aktiva dalam neraca dapat dikelompokkan menjadi aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva lain-lain. Aktiva dalam koperasi diperoleh dari sumbangan yang terikat penggunaannya dan tidak dapat dijual untuk menutup kerugian koperasi diakui sebagai aktiva lain-lain. Sifat keterikatan penggunaan tersebut dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Aktiva-aktiva yang dikelola oleh koperasi, tetapi bukan milik koperasi, tidak diakui sebagai aktiva, dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan (PSAK No. 27 paragraf 65).

Pencatatan atas aktiva didasarkan pada kejadian kapan perusahaan mendapatkan kekayaan atau aktiva itu dari pihak lain. Dalam hal pengorbanan yang diberikan adalah aktiva bukan uang, maka nilai yang dipakai adalah harga pasar barang yang diserahkan. Berbagai nilai yang sering dipakai dalam penilaian aktiva adalah :

- a. *Book value* adalah harga buku yang diperoleh dari nilai perolehan historis dikurangi akumulasi penyusutan yang telah dibebankan kepada pendapatan.
- b. *Replacement cost* adalah nilai barang yang dimaksud jika diganti dengan barang lain yang sama.
- c. *Selling price* adalah harga penjualan
- d. *Net reliazable* adalah harga jual dikurangi biaya penjualan atau dikurangi tingkat margin yang normal.

(Harahap 2003 : 207-208).

c. Penerapan Konsep Kewajiban

1. Pengertian Konsep Kewajiban

Menurut FASB dalam SFAC No. 6 kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa mendatang yang mungkin timbul karena kewajiban sekarang suatu perusahaan untuk menyerahkan aktiva atau memberikan jasa kepada perusahaan lain di masa mendatang sebagai akibat transaksi masa lalu. Sama dengan pengertian kewajiban yang dikemukakan FABS, IAI (1994) paragraf 62 kewajiban merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus kas keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi (Chariri 2000:157).

Menurut APB Statement No. 4 serta SFAC No. 5 kewajiban dinilai sebesar kejadian dalam transaksi, biasanya didiskontokan

(dinilai berdasarkan present value-untuk yang jangka panjang), sejumlah nilai pertukaran, atau sejumlah nilai nominal.

## 2. Pengakuan dan Pengukuran Konsep Kewajiban

Menurut PSAK No. 27 paragraf 61 Kewajiban dalam koperasi yang berupa simpanan anggota yang tidak berkarakteristik sebagai ekuitas diakui sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang sesuai dengan tanggal jatuh temponya dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

Beberapa karakteristik sehubungan dengan pos-pos kewajiban pada koperasi adalah sebagai berikut : kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi kewajiban kepada anggota dan bukan anggota, kewajiban sehubungan dengan simpanan dari anggota yang sifatnya sukarela, menurut UU No. 25 tahun 1992, simpanan semacam ini dapat dikelompokkan dalam permodalan koperasi, kewajiban kepada koperasi lain atau anggota yang timbul sehubungan dengan program pemerintah dibidang pengadaan dan penyaluran komoditi merupakan bagian dari harga pertukaran yang menjadi hak koperasi lain atau anggota tersebut.

### d. Penerapan Pendapatan dan Beban

#### 1. Pengertian Konsep Pendapatan dan Beban

##### a. Pendapatan

Dalam PSAK No. 23 paragraf 06 tentang pendapatan menjelaskan yang dimaksud pendapatan adalah arus masuk bruto

dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Sedangkan menurut FASB dalam SFAC No. 6 mendefinisikan pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan aktiva suatu beban usaha atau pelunasan utangnya (atau kombinasi keduanya selama suatu periode dari penyerahan atau produksi barang, penyerahan jasa, atau kegiatan lain.

b. Beban

Menurut FASB beban adalah aliran keluar (*outflow*) atau pemakaian aktiva atau timbulnya hutang (atau kombinasi keduanya) selama satu periode yang berasal dari penjualan atau produksi barang, atau penyerahan jasa atau pelaksanaan kegiatan yang lain yang merupakan kegiatan utama suatu badan usaha. Dengan demikian beban ada kaitannya dengan pendapatan dalam suatu periode tertentu. Hal ini sesuai dengan konsep penandingan. Beban usaha merupakan sejumlah uang atau aktiva lainnya yang dikeluarkan oleh koperasi dalam rangka untuk kegiatan operasional koperasi sehari-hari. Beban usaha terdiri dari beban penjualan dan beban administrasi dan umum. Sedangkan beban yang dikeluarkan untuk meningkatkan sumber daya anggota baik secara khusus maupun sumber daya koperasi secara nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota, hal ini tertuang dalam PSAK

No.27 paragraf 73. Beban-beban yang dikeluarkan untuk kegiatan ini disebut dengan beban perkoperasian. Beban yang termasuk dalam perkoperasian antara lain beban pelatihan anggota, beban pengembangan usaha anggota, dan beban iuran untuk gerakan koperasi.

## 2. Pengakuan dan Pengukuran Konsep Pendapatan dan Beban

### a. Pendapatan

Pendapatan diukur dalam satuan nilai produk/jasa dalam suatu transaksi yang akan diterima. Nilai tukar tersebut menunjukkan ekuivalen kas atau nilai diskonto tunai dari uang yang diterima atau akan diterima dari transaksi penjualan. Pendapatan atau transaksi yang terjadi dengan pihak ketiga, diukur sebesar nilai wajar penjualan yang menggambarkan nilai kas sekarang. Nilai kas sekarang adalah nilai kas yang sebenarnya diterima atau akan diterima atau harga pasar yang berlaku pada saat transaksi dikurangi dengan potongan tunai, diskonto dagang (rabat), volume yang diperbolehkan dari jumlah yang difakturkan dan dikurangi dengan penyisihan untuk mengantisipasi kerugian. Oleh karena itu, pendapatan diukur pada saat adanya kepastian dari jumlah yang akan diterima (Chariri 2000:185).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Koperasi mengatur pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan anggota diakui sebesar pendapatan bruto dan transaksi dengan non-

anggota diakui sebagai pendapatan (penjualan) dan dilaporkan terpisah dari partisipasi anggota dalam perhitungan hasil usaha sebesar nilai transaksi. Selisih antara pendapatan dan harga pokok transaksi dengan non-anggota diakui sebagai laba-rugi kotor dengan non-anggota. Pendapatan yang realisasi penerimaannya belum pasti dicatat sebagai pendapatan yang akan diterima dan disajikan dalam kelompok aktiva lancar.

**b. Beban**

Pada prinsipnya beban diakui di laporan laba/rugi pada saat terjadinya yaitu sebesar kas yang dikeluarkan atau sebesar harga barang dan jasa yang dikonsumsi. Beban disajikan dalam laporan laba/rugi dimulai dari beban yang merupakan usaha pokok koperasi sampai dengan beban yang bukan merupakan usaha pokok koperasi. Beban penyusutan yang terjadi diukur (ditentukan) dengan metode penaksiran tertentu misalnya metode garis lurus (Yulianto 1994:260). Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan mengenai beban meliputi metode pengakuan beban dan metode alokasi beban kepada anggota dan bukan anggota (Tugiman 1996:25). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Koperasi menyatakan bahwa perlakuan beban pokok koperasi adalah beban pokok yang timbul sehubungan dengan transaksi penjualan yang timbul dari sehubungan dengan transaksi penjualan produk/jasa kepada non-anggota penyajiannya mengacu

pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan lainnya. Hal ini tertuang dalam PSAK No. 27 paragraf 12 yaitu “ Pernyataan ini tidak mengatur akuntansi transaksi yang timbul dari hubungan koperasi dengan non-anggota. Transaksi tersebut diperlukan sama dengan transaksi yang terjadi pada badan usaha yang lainnya”.

e. Penerapan Konsep Ekuitas

1. Pengertian Konsep Ekuitas

Menurut PSAK No. 27 paragraf 39 ekuitas koperasi terdiri dari modal anggota berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib, modal penyertaan, modal sumbangan, cadangan, dan sisa hasil usaha belum dibagi. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat menjadi anggota. Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan pokok dan simpanan wajib berfungsi sebagai penutup risiko dan karena itu tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan dalam meningkatkan usaha koperasi (PSAK No. 27 paragraf 27). Modal

sumbangan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah dan tidak mengikat. Modal sumbangan tidak dapat dibagikan kepada anggota selama koperasi belum dibubarkan (PSAK No. 27 paragraf 26). Cadangan adalah bagian dari Sisa Hasil Usaha yang disisihkan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau ketetapan rapat anggota (PSAK No. 27 paragraf 28). Pembentukan cadangan dapat ditujukan antara lain untuk pengembangan usaha koperasi, menutup resiko kerugian, dan pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi. Sisa Hasil Usaha adalah gabungan dari hasil partisipasi neto dan laba atau rugi kotor dengan non-anggota, ditambah atau dikurangi dengan pendapatan dan beban lain serta beban perkoperasian dan pajak penghasilan badan koperasi (PSAK No. 27 paragraf 33).

## 2. Pengakuan dan Pengukuran konsep Ekuitas

Menurut PSAK No. 27 paragraf 40 Simpanan wajib yang terkait dengan pinjaman anggota dan jenis simpanan wajib lain yang dalam prakteknya justru dapat diambil setelah pinjaman yang bersangkutan lunas atau pada waktu-waktu tertentu, tidak dapat diakui sebagai ekuitas. Modal penyertaan ikut menutup risiko kerugian dan memiliki sifat relatif permanen, dan imbalan atas pemodal didasarkan atas hasil usaha yang diperoleh. Oleh karena itu, modal penyertaan tersebut diakui sebagai ekuitas (PSAK No. 27

paragraf 48). Modal penyertaan dicatat dengan nilai nominal, dan dalam hal modal penyertaan diterima dalam bentuk selain uang tunai, maka modal penyertaan tersebut dicatat sebesar nilai pasar yang berlaku pada saat diterima. Apabila nilai pasar tidak tersedia dapat digunakan nilai taksiran. Modal sumbangan yang diterima oleh koperasi yang didapat menutup risiko kerugian diakui sebagai ekuitas, sedangkan modal sumbangan yang substansinya merupakan pinjaman diakui sebagai kewajiban jangka panjang dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan (PSAK No. 27 paragraf 51). Cadangan yang dibentuk dari Sisa Hasil Usaha dicatat dalam akun cadangan. Tujuan penggunaan cadangan tersebut harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. SHU tahun berjalan dibagi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga yang berlaku pada koperasi.

### 2.3.3 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Yang Fleksibel

Menurut PSAK No. 1, tujuan Laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang fleksibel, memuat tiga tujuan dari laporan keuangan, yaitu :

a. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari laporan keuangan adalah untuk menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar sesuai dengan GAAP (*General Accepted Accounting Principle*).

b. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum laporan keuangan adalah :

1. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber-sumber ekonomi dan kewajiban perusahaan dengan maksud :
  - a Untuk menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan.
  - b Untuk menunjukkan posisi keuangan dan investasinya.
  - c Untuk menilai kemampuannya dalam penyelesaian utang-utangnya.
  - d Menunjukkan kemampuan sumber-sumber kekayaannya yang ada untuk pertumbuhan perusahaan.
2. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba dengan maksud :
  - a. Memberikan gambaran tentang deviden yang diharapkan pemegang saham.
  - b. Menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban pada kreditur, supplier, pegawai, pajak dan mengumpulkan dana untuk perluasan.

- c. Memberikan informasi kepada manajemen untuk digunakan dalam pelaksanaan fungsi perencanaan dan pengawasan.
  - d. Menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan mendapatkan laba dalam jangka panjang.
3. Memberikan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
  4. Memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan harta dan kekayaan.
  5. Mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan.
- c. Tujuan Kualitatif

Adapun tujuan kualitatif yang dirumuskan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan adalah sebagai berikut :

a. Dapat Dipahami

Kualitas informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai dan dinyatakan dalam bentuk dan dengan istilah yang disesuaikan dengan batas pengertian para pemakai. Dalam hal ini, dari pihak pemakai juga diharapkan adanya pengertian/pengetahuan mengenai aktivitas ekonomi perusahaan, proses akuntansi keuangan serta istilah-istilah teknis yang digunakan dalam laporan keuangan.

b. Relevan

Informasi agar dapat bermanfaat harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan atau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan kata lain agar informasi relevan maka informasi itu harus memiliki *predictive value* (meramalkan nilai masa yang akan datang), *feed back value* (menguatkan atau mengoreksi pengharapan yang sudah lalu) pada saat yang sama dan harus disampaikan pada waktu yang tepat. Dalam mempertimbangkan relevansi suatu informasi yang bertujuan umum, perhatian difokuskan pada kebutuhan umum pemakai, dan bukan pada kebutuhan khusus pihak tertentu, dengan demikian suatu informasi mungkin mempunyai tingkat relevansi yang tinggi untuk kegunaan khusus tertentu, sementara kecil sekali relevansi bagi kegunaan yang lain.

c. Materialitas

Informasi dipandang material kalau kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian

dalam mencantuman (*omission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*). Karena materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau titik pemisah dari pada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar informasi dipandang berguna.

d. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

e. Penyajian Jujur

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Informasi keuangan pada umumnya tidak luput dari risiko penyajian yang dianggap kurang jujur dari apa yang seharusnya digambarkan. Hal tersebut bukan disebabkan karena kesengajaan untuk menyesatkan, tetapi lebih merupakan kesulitan yang melekat dalam mengidentifikasi transaksi serta peristiwa lainnya yang dilaporkan, atau dalam menyusun atau menerapkan ukuran dan teknik penyajian yang sesuai dengan makna transaksi dan peristiwa tersebut.

f. Substansi Mengungguli Bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa yang lain seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum.

g. Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak tergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan berlawanan.

h. Pertimbangan Sehat

Penyusun laporan keuangan adakalanya menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian semacam itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dan menggunakan pertimbangan sehat (*prudence*) dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah.

i. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (*omission*) mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna dari segi relevansi.

j. Dapat Dibandingkan

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda.

k. Tepat Waktu

Informasi harus disampaikan sedini mungkin untuk dapat digunakan sebagai dasar untuk membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi dan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.

## 1. Penyajian Wajar

Laporan keuangan sering dianggap menggambarkan pandangan yang wajar atau menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Meskipun kerangka dasar ini tidak menangani secara langsung konsep tersebut, penerapan karakteristik kualitatif pokok dan standar keuangan yang sesuai biasanya menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan apa yang pada umumnya dipahami sebagai suatu pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar suatu informasi.

## 2.4. Perkembangan Usaha

### 2.4.1. Pengertian Perkembangan Usaha

Koperasi dilahirkan sebagai badan usaha yang mempunyai tujuan yang sangat jelas yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi adalah organisasi ekonomi, karena itu untuk mencapai tujuan memenuhi kebutuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan para anggotanya, Koperasi harus melakukan kegiatan usaha. Dalam mengembangkan usaha perkoperasian harus dilakukan secara seimbang jangan sampai kegiatan ekonominya tidak diisi dan hanya dilandasi nilai-nilai kemasyarakatannya saja. Jika usaha suatu koperasi tidak dijalankan secara seimbang maka koperasi lambat laun akan mengalami kerugian

sehingga modal semakin lama akan habis untuk menutup kerugian saja.

Perkembangan dalam arti harfiah adalah bertambah besar/bertambah sempurna. Sedangkan usaha adalah kegiatan atau aktivitas agar diperoleh hasil lebih baik (Winardi 1992 : 250), jadi perkembangan usaha adalah suatu kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran agar mendapat perubahan yang lebih baik atau bertambah maju, baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan.

#### 2.4.2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha

Menurut Widyanti Koperasi dalam mengembangkan usahanya harus memperhatikan faktor efektivitas dan efisiensi usaha. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah :

##### a. Faktor Efisiensi Proses Usaha

Sebagai bentuk usaha koperasi harus melaksanakan fungsi-fungsi perusahaan secara efisien. Fungsi yang dimaksud adalah fungsi pembelian, fungsi produksi, fungsi pemasaran, fungsi personalia, fungsi akuntansi, dan fungsi administrasi.

##### b. Faktor Loyalitas Anggota

Loyalitas anggota tercermin pada kesetiaan anggota sebagian pelanggan koperasi, memenuhi kewajiban dan melaksanakan hak keanggotaannya dalam segala bentuk kegiatan di dalam tata kehidupan koperasi.

c. Faktor Penawaran Yang Cukup

Barang-barang yang dibutuhkan anggota ataupun kepentingan lainnya yang sesuai dengan bidang usaha koperasi yang bersangkutan hendaknya cukup tersedia di koperasi, sehingga mereka tidak perlu mencarinya di luar koperasi, tidak boleh tidak mereka harus membelinya di luar koperasi. Dengan tersedianya barang kebutuhan anggota dikoperasi akan membidik anggota menjadi pelanggan yang setia.

d. Faktor Persaingan

Keberadaan bentuk usaha lain di sekitar koperasi, memaksa koperasi untuk bersaing. Karena itu koperasi harus peka terhadap pengaruh-pengaruh persaingan itu di dalam upaya mengendalikan usahanya. Koperasi tidak dapat menentukan sendiri harga barang-barang dan jenis barang yang dijual oleh koperasi, karena secara psikologis setiap individu, selalu berusaha untuk menentukan pilihannya terhadap barang-barang yang dibutuhkan mereka.

e. Faktor Harga Eceran

Perbedaan harga eceran koperasi dengan harga eceran di pasar merupakan salah satu sumber koperasi untuk meningkatkan tabungan anggota di koperasi. Apabila koperasi dapat membeli dengan harga eceran lebih murah di pasar dan menjualnya dengan harga eceran koperasi lebih tinggi, maka selisih harga kedua eceran ini, akan menjadi tabungan anggota di dalam koperasi.

Akan tetapi adalah sulit untuk membuat harga-harga di koperasi di bawah harga eceran di pasar, karena barang-barang yang dijual di koperasi adalah barang-barang kebutuhan pokok yang elastisitasnya rendah sekali maka keuntungan pun kecil sekali.

2.4.3. Strategi dan program-program dalam pengembangan usaha koperasi antara lain :

- a. Pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi para pengurus, manajer, karyawan, anggota badan pemeriksa, kader koperasi dan Petugas Konsultasi Koperasi Lapangan (PKKL).
- b. Bimbingan dan konsultasi untuk meningkatkan tertib organisasi terutama dalam penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
- c. Meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen koperasi.
- d. Meningkatkan kemampuan penerapan sistem akuntansi koperasi.
- e. Meningkatkan kemampuan pengawasan internal koperasi primer.
- f. Meningkatkan partisipasi aktif anggota.
- g. Penyediaan informasi anggota
- h. Pelaksanaan kegiatan praktik kerja atau magang bagi para pengelola usaha KUD
- i. Pelaksanaan kegiatan studi banding bagi para manajer koperasi untuk memperluas wawasan dan pengetahuan mereka.
- j. Penyuluhan untuk meningkatkan produktivitas usaha anggota melalui pendekatan kelompok

- k. Penyediaan sarana usaha koperasi dalam rangka meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan koperasi kepada anggota dan masyarakat sekitarnya di daerah tertinggal, transmigrasi, perbatasan dan terisolasi (Sumarsono 2003:122).

#### 2.4.4 Cara Mengukur Perkembangan Usaha

Perkembangan usaha dalam koperasi dapat diukur dari :

- a. Perkembangan omzet usaha

Dalam meningkatkan kesejahteraan anggota, koperasi harus mampu memberikan pelayanan yang baik khususnya dalam bidang penjualan karena akan dapat menarik minat pelanggan untuk membeli di koperasi. Untuk itu koperasi diharapkan lebih mengembangkan usahanya yang tidak hanya bergerak dalam satu bidang usaha saja dan seharusnya mampu diberbagai bidang usaha, sehingga masyarakat akan lebih tertarik kepada koperasi dibandingkan dengan usaha disekitar koperasi.

- b. Perkembangan aktiva

Aktiva dalam koperasi berasal dari transaksi atau peristiwa lain yang terjadi di masa lalu. Koperasi biasanya memperoleh aktiva melalui pembelian, produksi sendiri, tetapi transaksi atau peristiwa lain juga dapat menghasilkan aktiva misalnya properti yang diterima oleh koperasi dari pemerintah sebagai bagian dari program untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah.

c. Perkembangan Sisa Hasil Usaha

Sisa hasil usaha adalah pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan penyusutan dan biaya dari tahun buku yang bersangkutan. Pada hakikatnya sisa hasil usaha koperasi ini sama dengan laba bersih untuk perusahaan yang lain. Sisa hasil usaha harus dipisahkan antara sisa hasil usaha yang diperoleh dari transaksinya dengan para anggota dan sisa hasil usaha yang diperoleh dari pihak bukan anggota. Sebagian dari sisa hasil usaha yang diperoleh dari para anggota dapat dikembalikan kepada masing-masing anggota sebanding dengan jasa yang diberikannya. Sisa hasil usaha yang berasal dari pihak luar tidak boleh dibagikan kepada anggota. Sisa hasil usaha setelah dikurangi dengan bagian yang dikembalikan kepada anggota dibagikan untuk cadangan koperasi, dana pengurus, dana pegawai/karyawan, dana pendidikan koperasi, dana sosial, dan dana pembangunan daerah kerja. Penggunaan sisa hasil usaha dan besarnya masing-masing penggunaan ditetapkan dalam anggaran dasar koperasi. Bagian sisa hasil usaha yang dikembalikan kepada anggota dapat dikurangkan untuk mendapat laba kena pajak. Pada waktu koperasi dibubarkan sisa cadangan setelah dipergunakan untuk menutup kerugian yang diderita dan biaya penyelesaian tidak boleh dibagikan kepada anggota, tetapi harus dibagikan kepada perkumpulan koperasi atau

kepada badan lain yang as tujuannya sesuai dengan koperasi.  
(Tunggal 1995:35-38)

#### 2.4.5 Kendala-kendala Usaha yang dihadapi dalam koperasi

Perkembangan usaha koperasi sekarang ini dapat dikatakan masih jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan perkembangan usaha swasta lainnya. Hal ini disebabkan adanya masalah-masalah yang dihadapi koperasi, terutama antara lain pada aspek kelembagaan yang meliputi kepercayaan dan partisipasi anggota yang belum optimal, alat kelengkapan organisasi (rapat anggota, pengurus, badan pemeriksa) belum sepenuhnya berfungsi dengan baik, pengurus belum menyadari akan pentingnya prinsip-prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangannya, juga masalah pengawasan yang belum memadai. Di samping aspek kelembagaan tersebut, maka aspek usaha juga merupakan suatu permasalahan tersendiri bagi koperasi yaitu belum mampu memanfaatkan kesempatan atau peluang usaha dengan baik yang disebabkan kualitas pengelola yang masih belum memadai dan sarana usaha yang juga kurang memadai serta lemahnya permodalan. Hal-hal inilah antara lain yang menyebabkan sikap masyarakat masih berubah ubah dalam memandang lambaga koperasi (Widiyanti 1992:230).

Bila dilihat lebih dalam, ada sejumlah faktor lain yang menyebabkan perkembangan usaha koperasi masih jauh dari yang dicita-citakan. Penyebab tersebut ada yang melekat pada koperasi itu

sendiri (kendala intern), ada juga yang berada di luar batang tubuh koperasi (kendala ekstern).

Kendala intern bisa dilihat dari beberapa aspek, yaitu :

- a. Kelengkapan sumber daya profesional baik untuk mengelola organisasi maupun usaha koperasi.
- b. Keterbatasan sumber kapital swadaya.
- c. Masih rendahnya kesadaran berkoperasi di kalangan anggota.

Dilihat dari sisi ekstern, ada beberapa kendala yang cukup menonjol yang menyebabkan masih lambannya perkembangan usaha koperasi. Kendala tersebut antara lain :

- a. Persepsi tentang pentingnya dalam proses pembangunan nasional masih belum sama, baik di kalangan pemegang kebijakan maupun para pelaku ekonomi dan masyarakat pada umumnya.
- b. Perhatian lembaga keuangan masih sangat rendah.
- c. Iklim usaha yang kurang kondusif bagi kegiatan usaha koperasi.
- d. Aturan-aturan yang ada untuk koperasi terasa kaku dan mengungkung, mempersulit ruang gerak koperasi. Seperti aturan sumber modal, aturan wilayah kerja, proses pembentukan dan lain sebagainya (Widiyanti 1992:185).

Dari berbagai pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kendala-kendala yang dihadapi dalam koperasi antara lain disebabkan oleh :

- a. Kebijakan pengembangan KUD belum berlandaskan pada kenyataan-kenyataan riil dan situasi serta kondisi masyarakat pedesaan kita.
- b. Wilayah pelayanan KUD terlalu luas dibandingkan dengan kemampuan pengelolaan kelembagaan yang masih sangat lemah dan terbatas.
- c. Ketidakmampuan pengelolaan dan pengendalian masyarakat terhadap KUD berkaitan dengan tidak tepatnya kebijaksanaan pengembangan KUD di tingkat primer.
- d. KUD yang terkait dengan kegiatan-kegiatan di luar dan instansi pemerintah yang lebih tinggi, di pandang masyarakat pedesaan sebagai organisai yang besar dan modern sehingga masyarakat pedesaan marasa asing terhadap KUD sebagai suatu bentuk organisasi pelayanan yang dimiliki pemerintah bukan suatu organisasi yang menjadi milik mereka.

#### 2.4.6 Cara Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Usaha yang Dihadapi Dalam Koperasi

Untuk mempercepat perkembangan usaha koperasi maka kendala-kendala tersebut secara bertahap dan pasti harus diperkecil.

Cara untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, antara lain :

- a. Diadakan penyuluhan atau pendidikan khusus kepada anggota dan masyarakat mengenai pentingnya berkoperasi.
- b. Pengurus harus bisa mengelola organisasi dan usaha koperasi dengan baik.
- c. Mengusahakan hubungan keluar untuk meningkatkan usaha.
- d. Sistem administrasi dan sistem akuntansi dalam koperasi harus diadakan pengawasan yang lebih ketat.
- e. Harus berani menghadapi segala risiko yang akan terjadi apabila ingin memanfaatkan peluang usaha yang ada.
- f. Pengurus harus lebih dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang sewaktu-waktu akan terjadi.

#### 2.4.7 Usaha yang sehat pada Koperasi

Berhasil tidaknya suatu koperasi tergantung dari berbagai faktor, namun demikian untuk mencapai keberhasilan setiap koperasi harus berpedoman pada “tiga sehat”. Salah satu dari “tiga sehat” itu adalah sehat usaha.

Sehat usaha yaitu koperasi merupakan organisasi ekonomi rakyat yang dalam menjalankan usahanya harus berdasarkan prinsip ekonomi sehingga tercapai tingkat efisiensi sesuai dengan rencana. Suatu koperasi dikatakan memiliki sehat usaha apabila koperasi itu berhasil mencapai tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hal ini mencakup :

- a. Kegiatan usahanya berdasarkan pada asas dan sendi dasar koperasi.
- b. Usahanya berjalan lancar secara kontinyu, dapat memenuhi kewajibannya yang berlaku bagi koperasi serta dapat memperoleh SHU sesuai dengan yang diharapkan para anggotanya.
- c. Ikut sertanya anggota diimbangi dengan jasa oleh koperasi kepadanya dan minimal para anggota tidak merasa kecewa terhadap pelayanan koperasinya.
- d. Dapat dicapai tingkat efisiensi sesuai dengan rencana dengan mempercepat perputaran barang/jasa yang diberikan atau memperpendek periode perputaran arus barang antara produsen dan konsumen (Apsari 1987:7).

## 2.5 Kerangka Pemikiran

Sebagai suatu organisasi ekonomi, peran utama Koperasi tentulah dalam bidang ekonomi. Agar usaha koperasi benar-benar dapat menjamin tujuan berkoperasi (memberi kepuasan dalam pemenuhan kebutuhan/kepentingan para anggota) dan dapat berhasil mengembangkan koperasi menuju koperasi yang bisa membiayai sendiri usaha-usahanya, benar-benar menjadi “ pilar-pilar penopang utama” pembangunan ekonomi dalam rangka mensejahterakan hidup masyarakat dalam wujud masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila, maka tiap pengurus koperasi dituntut untuk dapat mengembangkan koperasi dengan usahanya, agar tidak hanya menjadi koperasi yang *single purpose* melainkan menjadi *multy purpose* (Kartasapoetra 1989:52).

Banyak faktor yang dapat mengembangkan usaha koperasi, adapun faktor tersebut terdapat faktor yang diduga berpengaruh terhadap perkembangan usaha koperasi yaitu penerapan Standar Akuntansi Keuangan Koperasi. Standar Akuntansi Keuangan adalah pedoman pokok penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi perusahaan dan yang berkepentingan adalah sangat penting, agar laporan keuangan lebih berguna dan dapat dimengerti, diperbandingkan serta tidak menyesatkan.

Laporan keuangan koperasi selain merupakan bagian dari sistem pelaporan keuangan koperasi, juga merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus tentang tata kehidupan koperasi. Dengan demikian dilihat dari fungsi manajemen, laporan keuangan sekaligus dapat dijadikan sebagai salah satu alat evaluasi perkembangan usaha koperasi. Agar laporan keuangan dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan tujuan koperasi, maka laporan keuangan harus disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Koperasi. Dengan Standar khusus untuk koperasi ini berarti koperasi menyusun laporan keuangannya berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim dipakai dengan memperhatikan karakteristik koperasi sehingga, dapat menggambarkan kemajuan atau perkembangan usaha koperasi.

Adanya Standar Akuntansi Khusus untuk Koperasi ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi yang timbul dari hubungan transaksi antara koperasi dengan anggotanya dan transaksi lain yang spesifik pada koperasi. Pernyataan ini mencakup pengaturan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam laporan keuangan (PSAK Paragraf 10).

Karena koperasi mempunyai karakteristik khusus maka perlakuan akuntansi yang timbul terutama yang menyangkut hubungan transaksinya dengan anggota atau hal-hal lain yang spesifik pada koperasi perlu diatur secara tersendiri di dalam PSAK No. 27. sedangkan apabila operasi menjalankan bisnis dengan non- anggota, maka koperasi diperlakukan seperti perusahaan lain yang berorientasi kepada laba dan karena itu perlakuan akuntansinya diatur dengan PSAK yang lain yang sesuai dengan bidang usaha yang dilaksanakan oleh koperasi. Dengan konsekuensinya maka pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan di dalam laporan keuangan mengenai transaksi koperasi dengan anggota dan non anggota perlu dilakukan pencatatan-pencatatan terpisah.. Meskipun demikian untuk laporan tertentu perlu dikonsolidasikan sedemikian rupa dalam rangka menginformasikan kondisi dan prestasi koperasi di dalam memberikan pelayanan kepada anggota dan bisnisnya dengan non anggota.

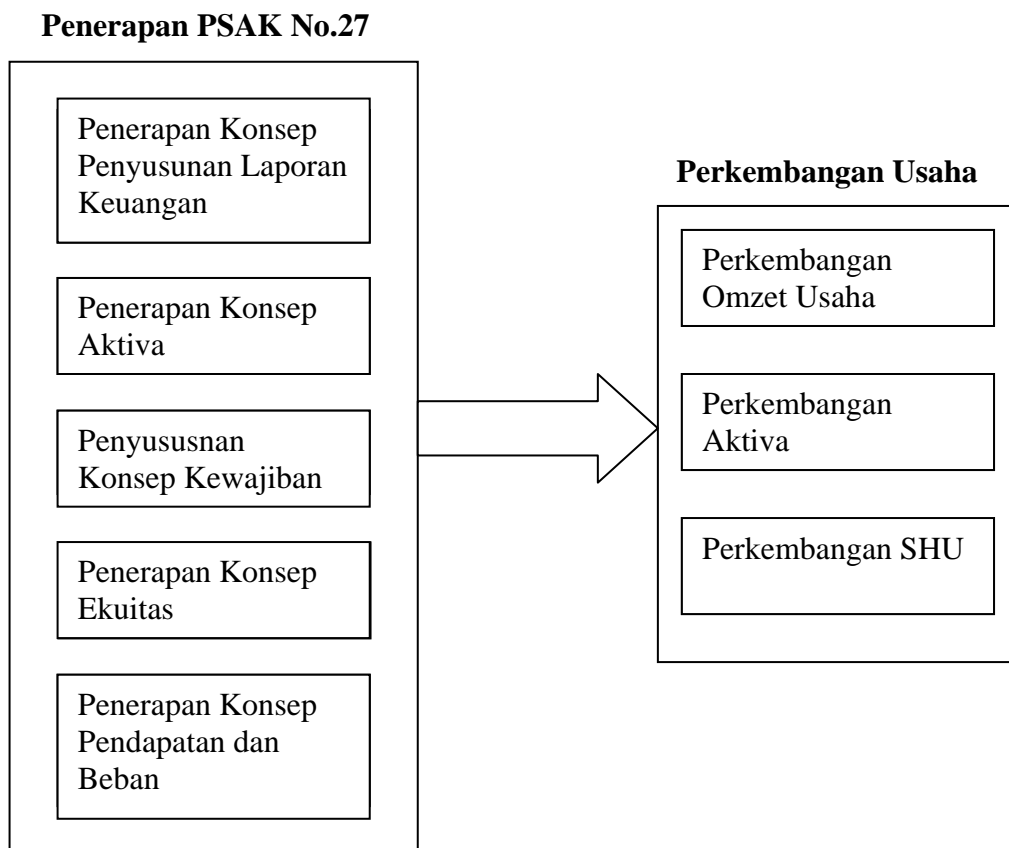
Koperasi dalam menjalankan usahanya tidak terlepas dari bantuan oleh berbagai pihak, oleh karena itu dalam PSAK No. 27 ini disajikan sebagai pedoman untuk menyusun laporan keuangan bagi semua pihak yang berkepentingan terutama anggota koperasi. Sesuai dengan karakteristik koperasi, maka anggota koperasi sebenarnya merupakan komponen internal dari organisasi koperasi. Tetapi karena terhadap koperasi diberlakukan sebagai badan usaha, berarti terhadap koperasi diperlakukan sebagai entitas akuntansi yang berdiri sendiri, sehingga anggota koperasi dianggap sebagai komponen eksternal koperasi. Pihak eksternal lain yang berkepentingan dengan koperasi adalah pemerintah, kreditur, pembina dan sebagainya. Semua pihak perlu memahami

PSAK No. 27 ini, sehingga terhadap laporan keuangan koperasi tidak dibaca dan ditafsirkan berdasarkan PSAK lain yang tidak sesuai, dalam hal ini untuk melihat hubungan koperasi dengan anggota tidak dapat digunakan PSAK untuk perusahaan yang berorientasi pada laba.

Kelengkapan laporan keuangan pada Koperasi itu sangat penting karena dalam laporan tersebut harus dapat menyampaikan informasi-informasi baik formal maupun informal tentang segala hal yang telah dilakukan oleh koperasi demi kepentingan anggota. Pada umumnya koperasi hanya menyampaikan laporan kepada anggota dalam bentuk neraca dan laporan rugi/laba saja, sedangkan yang dibutuhkan oleh anggota adalah informasi tentang usaha-usaha koperasi untuk memperjuangkan dan memperbaiki perekonomian anggota.

Untuk meningkatkan perkembangan usaha koperasi diperlukan pengelolaan manajemen yang baik. Oleh karena itu, diharapkan koperasi mampu untuk menyampaikan segala informasi-informasi tentang segala hal yang sudah dilakukan yaitu dengan menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 27 tentang Akuntansi Koperasi yang meliputi penerapan konsep penyusunan laporan keuangan, penerapan konsep aktiva, penerapan konsep kewajiban, penerapan konsep ekuitas, dan penerapan konsep pendapatan dan beban. Dengan peningkatan akuntabilitas pada Koperasi diharapkan mampu mendorong koperasi untuk berusaha secara efisien dalam memenuhi kebutuhan para anggotanya, sehingga dapat meningkatkan partisipasi anggota dan masyarakat yang nantinya akan meningkatkan perkembangan usaha koperasi.

Secara garis besar, kerangka pemikiran diatas dapat diilustrasikan dalam bagan sebagai berikut :



## 2.6 Hipotesis

Berdasarkan kerangka diatas, penulis mengambil hipotesis penelitian sebagai berikut :

“Ada pengaruh diterapkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 Tentang Akuntansi Koperasi terhadap Perkembangan Usaha pada KUD di Kabupaten Kendal Tahun 2004-2005.

**BAB III**  
**METODE PENELITIAN**

**3.1 Populasi Penelitian**

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto 2002:108). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh KUD yang terdapat di Kabupaten Kendal yang telah berbadan hukum dan terdaftar di Departemen Koperasi.

Adapun daftar populasi KUD di Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Daftar KUD di Kabupaten Kendal

No	Nama KUD	No	Nama KUD
1	KUD Agung	10	KUD Dewi Shinta
2	KUD Aneka Tani Jaya	11	KUD Karya Usaha
3	KUD Darma Tani	12	KUD Jelita
4	KUD Harapan	13	KUD Remaja
5	KUD Dewi Ratih	14	KUD Subur
6	KUD Dewi Sri	15	KUD Rukun Tani
7	KUD Sri Sadono	16	KUD Karya Tani
8	KUD Pelita	17	KUD Makmur
9	KUD Unggul	18	KUD Intan

(Data Primer : Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Kendal)

### 3.2 Sampel Penelitian

Sampel adalah sebagian dari wakil populasi yang diteliti (Arikunto 2002:109). Lebih lanjut Arikunto menegaskan bahwa apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua dan bila subjeknya lebih besar dari 100 dapat diambil diantara 10-15% atau 20-25%. Dalam penelitian subjek penelitian ada 18 KUD, maka populasi tersebut diambil semua sebagai sampel didalam penelitian sehingga penelitian ini disebut dengan penelitian populasi.

### 3.3 Variabel Penelitian

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Arikunto 2002:96). Variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Variabel Bebas (X)

Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah Variabel yang mempengaruhi variabel terikat yaitu Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 tentang Akuntansi Koperasi, dengan indikator :

- a. Penerapan konsep penyusunan laporan keuangan
- b. Penerapan konsep aktiva
- c. Penerapan konsep kewajiban
- d. Penerapan konsep ekuitas
- e. Penerapan konsep pendapatan dan beban

## 2. Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat (Y) merupakan variabel yang dipengaruhi variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Perkembangan Usaha pada KUD sekabupaten Kendal, dengan indikator :

- a. Perkembangan Omzet Usaha tahun 2004-2005 diperoleh dari :  
    Penjualan dan Pendapatan
- b. Perkembangan Aktiva tahun 2004-2005
- c. Perkembangan sisa hasil usaha tahun 2004-2005

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 3.4.1 Metode interviu/wawancara

Interviu yang sering juga disebut dengan wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (Arikunto 2002:132). Interviu yang digunakan dalam penelitian ini adalah interviu terstruktur yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai check-list.

Pewawancara tinggal membubuhkan tanda v (check) pada nomor yang sesuai. Pertanyaan tersebut tersusun dalam bentuk pilihan antara “ya” dan “tidak”, sehingga peneliti tinggal membubuhkan tanda v (check) pada nomor yang sesuai. Skor untuk jawaban “ya” adalah 1 dan skor untuk jawaban “tidak” adalah 0.

### 3.4.2 Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu cara untuk memperoleh data atau informasi tentang hal-hal yang ada kaitannya dengan penelitian, dengan jalan melihat kembali sumber tertulis yang lalu baik berupa angka atau keterangan (tulisan, paper, tempat dan kertas atau orang) (Arikunto 2002:135). Dalam penelitian ini, metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari dokumen yang ada pada KUD di Kabupaten Kendal berupa laporan keuangan tahun 2004-2005.

## 3.5 Metode Analisis Data

Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh dengan menggunakan rumus atau aturan-aturan yang ada sesuai dengan pendekatan penelitian (Arikunto 2002: 208). Analisis data ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis dalam rangka penarikan kesimpulan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi :

### 3.5.1 Metode Deskriptif Persentase

Metode deskriptif persentase digunakan untuk mengkaji dan mengukur prosentase Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Koperasi pada KUD di Kabupaten Kendal tahun 2004-2005. Untuk mengukur Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Koperasi dilakukan dengan memberi skor jawaban angket yang diisi oleh pengurus koperasi dengan ketentuan jawaban “ya” diberi skor 1 dan “tidak” diberi skor 0.

Untuk mengetahui secara tepat tingkat persentase skor jawaban digunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\% = \frac{n}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

n = skor empirik (skor yang diperoleh)

N = jumlah seluruh skor atau nilai (skor ideal)

% = tingkat keberhasilan yang dicapai

Perhitungan deskriptif persentase ini mempunyai langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menentukan persentase maksimal yaitu 100%
- b. Menentukan persentase minimal 0%
- c. Menentukan interval kelas persentase, diperoleh dari pembagian kriteria terhadap rentang persentase, maka didapatkan  $100\% : 5 = 20\%$

Tabel 2

Kriteria Penerapan PSAK Koperasi

No	Rentang Persentase	Kriteria
1	80% - 100%	Sangat Baik
2	60% - 79%	Baik
3	40% - 59%	Cukup Baik
4	20% - 39%	Tidak Baik
5	0% - 19%	Sangat Tidak Baik

### 3.5.2 Metode Analisis Ratio

Analisis rasio dalam penelitian ini adalah pengukuran secara kuantitatif mengenai perkembangan usaha pada KUD di Kabupaten Kendal berdasarkan laporan keuangan tahun terakhir yaitu tahun 2004-2005. Adapun perkembangan usaha pada KUD di Kabupaten Kendal dapat diukur dari rasio sebagai berikut:

- a. Perkembangan Omzet Usaha tahun 2004-2005

$$= \frac{\text{TotalOmzetUsahaTahun2005}}{\text{TotalOmzetUsahaTahun2004}} \times 100\%$$

- b. Perkembangan Neett Asset tahun 2004-2005

$$= \frac{\text{TotalAktivaTahun2005}}{\text{TotalAktivaTahun2004}} \times 100\%$$

- c. Perkembangan Sisa Hasil Usaha 2004-2005

$$= \frac{\text{TotalSHUTahun2005}}{\text{TotalSHUTahun2004}} \times 100\%$$

Keberhasilan Koperasi dapat diukur dari meningkatnya perkembangan usaha tahun sekarang dibandingkan dengan perkembangan usaha tahun yang lalu. Untuk dapat mengetahui secara tepat tingkat perkembangan usaha koperasi dari hasil masing-masing indikator yang diperoleh kemudian dicocokkan dengan tabel kriteria. Dengan tabel tersebut dapat diketahui apakah perkembangan usaha pada KUD di Kabupaten Kendal tahun 2004 – 2005 termasuk kriteria sangat tinggi, tinggi, cukup, rendah atau sangat rendah.

1. Penetapan indikator perkembangan omzet usaha yang berasal dari hasil penjualan dan pendapatan pada KUD di Kabupaten Kendal tahun 2004–2005 dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya selama satu periode.

Berdasarkan data yang diperoleh dari perkembangan omzet usaha maka didapat :

Skor maksimal : 116.85%

Skor minimal : -3.94%

Jumlah kriteria : 5

Interval kelas  $\frac{116.85\% - (-3.94)\%}{5}$  : 24.16%

Tabel 3

Kriteria Perkembangan Omzet Usaha

No	Rentang Persentase	Kriteria	Skor
1	-3.94% - 20.22%	Sangat Rendah	1
2	20.23% - 44.38%	Rendah	2
3	44.39% - 68.53%	Cukup	3
4	68.54% - 92.69%	Tinggi	4
5	92.70% - 116.85%	Sangat Tinggi	5

2. Penetapan indikator perkembangan aktiva pada KUD di Kabupaten Kendal tahun 2004–2005 dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam mengolah sumber kekayaan selama satu periode.

Berdasarkan data yang diperoleh dari perkembangan aktiva maka didapat:

Skor maksimal : 15.84%

Skor minimal : -2.49%

Jumlah kriteria : 5

Interval kelas  $\frac{15.84\% - (-2.49)\%}{5}$  : 3.66%

Tabel 4

Kriteria Perkembangan Aktiva

No	Rentang Persentase	Kriteria	Skor
1	-2.49% - 1.17%	Sangat Rendah	1
2	1.18% - 4.84%	Rendah	2
3	4.85% - 8.51%	Cukup	3
4	8.52% - 12.17%	Tinggi	4
5	12.18% - 15.84%	Sangat Tinggi	5

3. Penetapan indikator perkembangan SHU pada KUD di Kabupaten Kendal tahun 2004 – 2005 dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai keberhasilan atau kegagalan dalam meningkatkan laba koperasi selama satu periode.

Berdasarkan data yang diperoleh dari perkembangan SHU maka didapat:

Skor maksimal : 282.07%

Skor minimal : -82.79%

Jumlah kriteria : 5

Interval kelas  $\frac{282.07\% - (-82.79)\%}{5}$  : 73.97%

Tabel 5  
Kriteria Perkembangan SHU

No	Rentang Persentase	Kriteria	Skor
1	-82.79% - (-9.82)%	Sangat Rendah	1
2	-9.83% - 63.15%	Rendah	2
3	63.15% - 136.12%	Cukup	3
4	136.13%- 209.9%	Tinggi	4
5	209.10%- 282.07%	Sangat Tinggi	5

### 3.5.3 Metode Analisis Regresi Sederhana

Untuk menganalisis data dalam penelitian skripsi ini digunakan analisis regresi, untuk mengetahui adakah pengaruh yang signifikan pada penerapan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 Tentang Akuntansi Koperasi terhadap perkembangan Usaha.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persamaan garis regresi yaitu :

$$\hat{Y} = a + bX$$

Keterangan :

X : variabel bebas

Y : variabel terikat

a,b : koefisien korelasi

Dimana :

$$a = \frac{\sum Y \sum X^2 - \sum X \sum XY}{N \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$b = \frac{N \sum XY - \sum X \sum Y}{N \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

b adalah koefisien arah regresi linier yang digunakan untuk menyatakan perubahan rata-rata variabel Y untuk setiap perubahan variabel X sebesar satu unit. Jika b positif maka terjadi penambahan dan jika b negatif maka terjadi penurunan atau pengurangan (Sudjana, 1992 : 314).

1. Uji keberartian regresi dan uji kelinieran regresi.

Untuk menguji hipotesis yang menyatakan ada pengaruh positif antara penerapan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 tentang Akuntansi Koperasi dengan perkembangan usaha koperasi dilakukan uji keberartian dan uji kelinieran regresi. Uji keberartian dan uji kelinieran regresi dilakukan dengan menggunakan rumus analisis varians :

Tabel 6

Analisis Varians

Sumber Variasi	Dk	JK	KT	F
Total	N	$\sum Y^2$	$\sum Y^2$	
Regresi (a)	1	$\frac{(\sum Y)^2}{n}$	$\frac{(\sum Y)^2}{n}$	
Regresi (b/a)	1	JKreg=(b/a)	S <sup>2</sup> reg=JK(b/a)	$\frac{S^2_{reg}}{S^2_{sis}}$
Residu (sis)	N - 2	JKsis= $\sum (Y - \hat{Y})^2$	S <sup>2</sup> sis= $\frac{\sum (Y - \hat{Y})^2}{n - 2}$	
Tuna cocok	K - 2	JK (TC)	$S^2_{TC} = \frac{JK(TC)}{k - 2}$	$\frac{S^2_{TC}}{S^2_G}$
Kekeliruan	N - k	JK (G)	$S^2_G = \frac{JK(G)}{n - k}$	

Perhitungan JK

$$JK (T) = \sum Y^2$$

$$JK (a) = \frac{\sum (Y)^2}{n}$$

$$JK (b/a) = b \left\{ \sum XY - \frac{(\sum X)(\sum Y)}{n} \right\}$$

$$JK (S) = JK (T) - JK (a) - JK (b/a)$$

$$JK (G) = \sum_{xi} \left\{ \sum Y^2 - \frac{(\sum Y)^2}{n_1} \right\}$$

$$JK (TC) = JK (S) - JK (G)$$

$F = \frac{S^2_{reg}}{S^2_{sis}}$  untuk menguji keberartian regresi. Jika  $F (hit) > F (tabel)$  dengan

dk yang berkesesuaian maka koefisien regresi berarti.

$F = \frac{S^2_{reg}}{S^2_{sis}}$  untuk menguji linieritas garis regresi. Jika  $F (hit) < F (tabel)$

dengan dk yang berkesesuaian maka bentuk regresi linier.

## 2. Mencari harga koefisien korelasi

Menurut Sudjana (1992:369) untuk mencari derajat hubungan antara variabel X dan Variabel Y digunakan rumus :

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan :

$r$  = Koefisien korelasi

$X$  = variabel bebas

$Y$  = variabel terikat

Harga koefisien korelasi bergerak antara -1 dan +1 dengan tanda negatif menyatakan adanya korelasi tak langsung atau korelasi negatif dan tanda positif menyatakan korelasi langsung atau korelasi positif. Jika  $r = 0$  maka dikatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang linier antara  $X$  dan variabel  $Y$ .

### 3. Mencari harga koefisien determinasi

Koefisien determinasi menentukan besar hubungan variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas dengan adanya regresi linier  $Y$  atas  $X$ .

Menurut Sudjana (1992:370) besarnya koefisien determinasi dicari dengan rumus :

$$r = \frac{b\{n\sum XY - (\sum X)(\sum Y)\}}{n\sum Y^2 - (\sum Y)}$$

Dari koefisien determinasi dapat diketahui berapa besar kontribusi variabel  $X$  terhadap variabel  $Y$ .

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Gambaran Umum Variabel Penelitian

##### 4.1.1.1 Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Koperasi No. 27 pada KUD di Kabupaten Kendal

Penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan koperasi no 27 pada KUD di Kabupaten Kendal secara umum sudah dilaksanakan dengan baik, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7  
Gambaran Umum Penerapan PSAK No 27 pada KUD di Kabupaten Kendal

<b>Interval</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
80% - 100%	Sangat Baik	5	27.8
60% - 79%	Baik	12	66.7
40% - 59%	Cukup Baik	1	5.6
20% - 39%	Tidak Baik	0	0.0
0% - 19%	Sangat Tidak Baik	0	0.0
Total		18	100

Sumber: data primer 2006

Terlihat dari tabel di atas, dari 18 KUD di Kabupaten Kendal yang diteliti terdapat 12 KUD (66,7%) telah menerapkan PSAK dengan baik, 5 KUD (27,8%) telah menerapkan PSAK dengan sangat baik dan hanya satu KUD (5,6%) dalam kategori cukup. Ini artinya bahwa sebagian besar KUD di Kabupaten telah menerapkan konsep penyusunan laporan keuangan, konsep aktiva, konsep kewajiban, konsep ekuitas, konsep pendapatan dan beban dengan baik.

## 1. Konsep Penyusunan Laporan Keuangan

Konsep penyusunan laporan keuangan yang dijalankan oleh sebagian besar KUD di Kabupaten Kendal tergolong baik. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8  
Gambaran Umum Penerapan PSAK No 27 pada Indikator Konsep Penyusunan Laporan keuangan pada KUD di Kabupaten Kendal

Interval	Kriteria	Frekuensi	Persentase
80% - 100%	Sangat Baik	2	11.1
60% - 79%	Baik	15	83.3
40% - 59%	Cukup Baik	0	0.0
20% - 39%	Tidak Baik	1	5.6
0% - 19%	Sangat Tidak Baik	0	0.0
Total		18	100

Sumber: data primer 2006

Terlihat dari tabel di atas, sebanyak 15 KUD (83,3%) telah menerapkan konsep penyusunan laporan keuangan secara baik, sebanyak 2 KUD (11,1%) telah menerapkan konsep penyusunan laporan keuangan dengan sangat baik, namun masih ada 1 KUD. Dari data ternyata masih ada 5,6% dalam kategori tidak baik. Lebih jelasnya penerapan konsep penyusunan laporan keuangan pada KUD di Kabupaten Kendal dapat dilihat pada table 9

Tabel 9  
Distribusi Frekuensi Penyusunan Laporan Keuangan  
pada KUD di Kabupaten Kendal

No	Penyajian	F	%
1	Neraca	18	100.0
2	Perhitungan hasil usaha	17	94.4
3	Laporan arus kas	4	22.2
4	Laporan promosi ekonomi anggota	0	0.0
5	Catatan atas laporan keuangan	18	100.0
6	Tepat waktu	18	100.0
7	Informasi mengenai aktiva sesuai PSAK	17	94.4
8	Informasi kewajiban sesuai PSAK	16	88.9
9	Informasi ekuitas sesuai PSAK	15	83.3
10	Perhitungan hasil usaha memuat laba atau rugi kotor dari non anggota	15	83.3
11	Perhitungan hasil usaha dipisahkan dari pos penghasilan dari anggota dan non anggota	10	55.6
12	Laporan arus kas meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas, dan saldo akhir kas pada periode tertentu	4	22.2
13	melaporkan arus kas secara tepat waktu	4	22.2
14	Dalam SHU tahun berjalan belum dibagi, manfaat ekonomi yang diperoleh anggota dari pembagian SHU pada akhir tahun buku dicatat sebesar taksiran jumlah SHU yang akan dibagi untuk anggota	14	77.8
15	Catatan atas laporan keuangan meliputi pengungkapan, pengukuran, penyajian, dan pengakuan dari aktiva	16	88.9
16	Catatan atas laporan keuangan meliputi pengungkapan, pengukuran, penyajian, dan pengakuan dari kewajiban	17	94.4
17	Catatan atas laporan keuangan meliputi pengungkapan, pengukuran, penyajian, dan pengakuan dari ekuitas	17	94.4
18	Catatan atas laporan keuangan meliputi pengungkapan, pengukuran, penyajian, dan pengakuan dari pendapatan dan beban	17	94.4

Sumber: data primer 2006

Terlihat dari tabel di atas, sebagian besar KUD telah melakukan penyajian keuangan dengan PSAK, namun ada beberapa yang belum disajikan dengan baik yaitu berkaitan dengan penyajian arus kas. Dari data hanya 4 KUD (22,2%) saja yang melakukan penyajian laporan arus kas, bahkan tidak ada satupun KUD yang menyajikan laporan promosi ekonomi anggota. Dari data hanya 4 KUD (33,3%) yang melakukan penyajian laporan arus kas meliputi saldo awal kas, sumber

penerimaan kas, pengeluaran kas dan saldo akhir kas pada periode tertentu, dan melaporkan arus kas secara tepat waktu.

## 2. Konsep Aktiva

Konsep aktiva yang dijalankan oleh sebagian besar KUD di Kabupaten Kendal tergolong sangat baik. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10  
Gambaran Umum Penerapan PSAK No 27 pada Indikator Konsep Aktiva pada KUD di Kabupaten Kendal

<b>Interval</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
80% - 100%	Sangat Baik	9	50.0
60% - 79%	Baik	5	27.8
40% - 59%	Cukup Baik	4	22.2
20% - 39%	Tidak Baik	0	0.0
0% - 19%	Sangat Tidak Baik	0	0.0
Total		18	100

Sumber: data primer 2006

Terlihat dari tabel di atas, sebanyak 50% KUD telah menerapkan konsep aktiva dengan sangat baik dan 27,8% dalam kategori baik, namun masih ada 22,2% dalam kategori cukup baik. Lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel distribusi tentang penjian konsep aktiva pada tabel berikut.

Tabel 11.

## Distribusi Frekuensi Penyajian Konsep Aktiva

No	Penyajian	F	%
1	Aktiva yang diperoleh dari sumbangan yang terikat penggunaannya dan tidak dapat dijual untuk menutup kerugian pada Koperasi diakui sebagai aktiva lain-lain	7	38.9
2	Aktiva yang diperoleh dari sumbangan yang terikat penggunaannya dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan	15	83.3
3	Aktiva-aktiva yang dikelola oleh Koperasi, tetapi bukan milik koperasi tidak diakui sebagai aktiva	11	61.1
4	Aktiva-aktiva yang dikelola oleh Koperasi, tetapi bukan milik koperasi dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan	10	55.6
5	Aktiva dipisahkan antar lain aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap dan aktiva lain-lain	18	100.0
6	Pemisahan piutang pinjaman anggota dan non- anggota	18	100.0
7	Aktiva dicantumkan secara terperinci	18	100.0

Sumber: data primer 2006

Terlihat dari tabel tampak bahwa semua KUD telah menyajikan aktiva yang dipisahkan antara lain aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap dan aktiva lain-lain, melakukan pemisahan piutang pinjaman anggota dan non anggota serta aktiva dicantumkan secara terperinci,. Dari data sebanyak 15 KUD (83,3%) yang mencatatkan aktiva yang diperoleh dari sumbangan yang terikat penggunaannya dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Pada aspek ini ada beberapa yang masih kurang antara lain: hanya 7 KUD (38,9%) yang aktiva yang diperoleh dari sumbangan yang terikat penggunaannya dan tidak dapat dijual untuk menutup kerugian pada koperasi diakui sebagai aktiva lain-lain. Dari data hanya 10 KUD (55,6%) yang menyajikan aktiva yang dikelola koperasi namun bukan milik koperasi dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

### 3. Konsep Kewajiban

Konsep kewajiban yang dijalankan oleh sebagian besar KUD di Kabupaten Kendal tergolong sangat baik. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 12.  
Gambaran Umum Penerapan PSAK No 27 pada Indikator Konsep Kewajiban pada KUD di Kabupaten Kendal

Interval	Kriteria	Frekuensi	Persentase
80% - 100%	Sangat Baik	15	83.3
60% - 79%	Baik	3	16.7
40% - 59%	Cukup Baik	0	0.0
20% - 39%	Tidak Baik	0	0.0
0% - 19%	Sangat Tidak Baik	0	0.0
Total		18	100

Sumber: data primer 2006

Terlihat dari tabel di atas, sebanyak 83,3% KUD telah menerapkan konsep kewajiban dengan sangat baik dan 16,7% dalam kategori baik. Lebih jelasnya dapat dilihat dari distribusi frekuensi penerapan konsep kewajiban pada tabel berikut.

Tabel 13.  
Distribusi Frekuensi Penyajian Konsep Kewajiban

No	Penyajian	F	%
1	Pemisahan hutang simpanan anggota dan non-anggota	15	83.3
2	Simpanan anggota yang tidak berkarakteristik sebagai ekuitas diakui sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang sesuai tanggal jatuh tempo	18	100.0
3	Simpanan anggota yang tidak berkarakteristik sebagai ekuitas dicatat sebesar nilai nominalnya	18	100.0
4	Kewajiban dicantumkan secara terperinci	18	100.0

Sumber: data primer 2006

Terlihat dari tabel di atas, semua KUD telah melakukan penyajian tentang konsep kewajiban dimana simpanan anggota yang tidak berkarakteristik sebagai

ekuitas diakui sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang tanggal jatuh tempo, simpanan anggota yang tidak berkarakteristik sebagai ekuitas dicatat sebesar nilai nominalnya dan kewajiban dicantumkan secara terperinci. Namun demikian sebanyak 15 KUD (83,3%) melakukan pemisahan hutang simpanan anggota dan non anggota.

#### 4. Konsep Ekuitas

Konsep ekuitas yang dijalankan oleh sebagian besar KUD di Kabupaten Kendal tergolong sangat baik dan baik. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14  
Gambaran Umum Penerapan PSAK No 27 pada Indikator Konsep Ekuitas pada KUD di Kabupaten Kendal

Interval	Kriteria	Frekuensi	Persentase
80% - 100%	Sangat Baik	6	33.3
60% - 79%	Baik	11	61.1
40% - 59%	Cukup Baik	1	5.6
20% - 39%	Tidak Baik	0	0.0
0% - 19%	Sangat Tidak Baik	0	0.0
Total		18	100

Sumber: data primer 2006

Terlihat dari tabel di atas, sebanyak 11 KUD (61,1%) telah menerapkan konsep ekuitas dengan baik dan 6 KUD (33,3%) dalam kategori sangat baik, namun masih ada 1 KUD yang tergolong cukup baik. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 15.  
Distribusi Frekuensi Penyajian Konsep Ekuitas

No	Penyajian	F	%
1	Simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan lain dari anggota yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib diakui sebagai ekuitas koperasi	18	100.0
2	Simpanan pokok dan simpanan lain dari anggota yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib dicatat sebesar nilai nominalnya	18	100.0
3	Simpanan pokok yang belum diterima dari anggota disajikan sebagai piutang simpanan pokok	17	94.4
4	Simpanan wajib yang belum diterima dari anggota disajikan sebagai piutang simpanan wajib	16	88.9
5	Kelebihan setoran simpanan pokok anggota baru di atas nilai nominal simpanan pokok anggota pendiri diakui sebagai modal penyertaan partisipasi anggota	5	27.8
6	Kelebihan setoran simpanan wajib anggota baru diatas nilai nominal simpanan wajib anggota pendiri diakui sebagai modal penyetaraan partisipasi anggota	4	22.2
7	modal penyetaraan yang berupa uang atau barang yang ditanamkan oleh pemodal untuk meningkatkan usaha koperasi diakui sebagai ekuitas	13	72.2
8	Modal penyertaan dicatat sebesar jumlah nilai nominal setoran	16	88.9
9	Modal penyertaan yang diterima selain uang tunai dicatat sebesar harga pasar yang berlaku pada saat siterima	10	55.6
10	Ketentuan mengenai perjanjian dengan pemodal yang menyangkut pembagian keuntungan atau hasil usaha, tanggungan kerugian, jangka waktu dan hak-hak pemodal dijelaskan didalam catatan atas laporan keuangan	9	50.0
11	Modal sumbangan yang diterima oleh koperasi yang dapat menutup resiko kerugian diakui sebagai ekuitas	17	94.4
12	Modal sumbangan yang tujuannya merupakan pinjamam diakui sebagai kewajiban jangka panjang	13	72.2
13	Modal sumbangan yang tujuannya merupakan pinjamam dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan	15	83.3
14	Sisa Hasil Usaha sebagian disisihkan sebagai cadangan	15	83.3
15	Cadangan dan tujuan penggunaannya dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan	15	83.3
16	Pembayaran tambahan kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi diatas jumlah simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain-lain dibebankan pada cadangan	15	83.3
17	Pembagian SHU tahun berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada koperasi	16	88.9
18	Dalam hal jenis dan jumlah pembagian hasil usaha telah diatur secara jelas, maka bagian yang menjadi hak koperasi diakui sebagai kewajiban	15	83.3
19	SHU yang pembagiannya belum diatur secara jelas dicatat sebagai SHU belum dibagi	15	83.3
20	SHU yang pembagiannya belum diatur secara jelas dicatat dalam catatan atas laporan keunagan	15	83.3
21	SHU belum dibagi dipisahkan untuk anggota dan non anggota	6	33.3

Sumber: data primer 2006

Terlihat dari tabel di atas, hampir semua KUD telah menerapkan konsep ekuitas sesuai dengan PSAK, namun ada beberapa hal yang masih belum terlaksana antara lain: 1) Kelebihan setoran simpanan pokok anggota baru di atas nilai nominal simpanan pokok anggota pendiri diakui sebagai modal penyertaan partisipasi anggota, yang dilaksanakan oleh 27,8% KUD. 2) Kelebihan setoran simpanan wajib anggota baru di atas nilai nominal simpanan wajib anggota pendiri diakui sebagai modal penyetaraan partisipasi anggota, yang hanya dilaksanakan oleh 22,2%. 3) Modal penyertaan yang diterima selain uang tunai dicatat sebesar harga pasar yang berlaku pada saat diterima, yang dilaksanakan oleh 55,6%, 4) Ketentuan mengenai perjanjian dengan pemodal yang menyangkut pembagian keuntungan atau hasil usaha, tanggungan kerugian, jangka waktu dan hak-hak pemodal dijelaskan didalam catatan atas laporan keuangan yang dilaksanakan oleh 50% KUD. 5) SHU belum dibagi dipisahkan untuk anggota dan non anggota yang dilaksanakan oleh 33,3% KUD.

## 5. Konsep Pendapatan dan Beban

Konsep pendapatan dan beban yang dijalankan oleh sebagian besar KUD di Kabupaten Kendal tergolong sangat baik. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 16  
Gambaran Umum Penerapan PSAK No 27 pada Indikator Konsep Pendapatan dan Beban pada KUD di Kabupaten Kendal

<b>Interval</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
80% - 100%	Sangat Baik	9	50.0
60% - 79%	Baik	2	11.1
40% - 59%	Cukup Baik	5	27.8
20% - 39%	Tidak Baik	2	11.1
0% - 19%	Sangat Tidak Baik	0	0.0
<b>Total</b>		18	100

Sumber: data primer 2006

Terlihat dari tabel di atas, sebanyak 50% KUD telah menerapkan konsep pendapatan dan beban dengan sangat baik, 11,1% dalam kategori baik, 27,8% cukup baik dan 11,1% dalam kategori tidak baik. Lebih jelasnya gambaran tentang penerapan konsep pendapatan dan beban dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 17.  
Distribusi Frekuensi Penyajian Konsep Pendapatan dan Beban

No	Penyajian	F	%
1	Pendapatan koperasi yang timbul dari anggota diakui sebesar partisipasi bruto	7	38.9
2	Pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan non anggota diakui sebagai pendapatan (penjualan)	15	83.3
3	Pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi dengan anggota dan non anggota dilaporkan secara terpisah dalam laporan perhitungan hasil usaha	11	61.1
4	Pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi dengan anggota dan non anggota dicatat sebesar nilai transaksi dalam laporan perhitungan hasil usaha	13	72.2
5	Selisih antara pendapatan dan beban pokok transaksi dengan non anggota diakui sebagai laba atau rugi kotor dengan non anggota	18	100.0
6	Beban usaha dan beban perkoperasian disajikan terpisah dalam laporan perhitungan hasil usaha	12	66.7

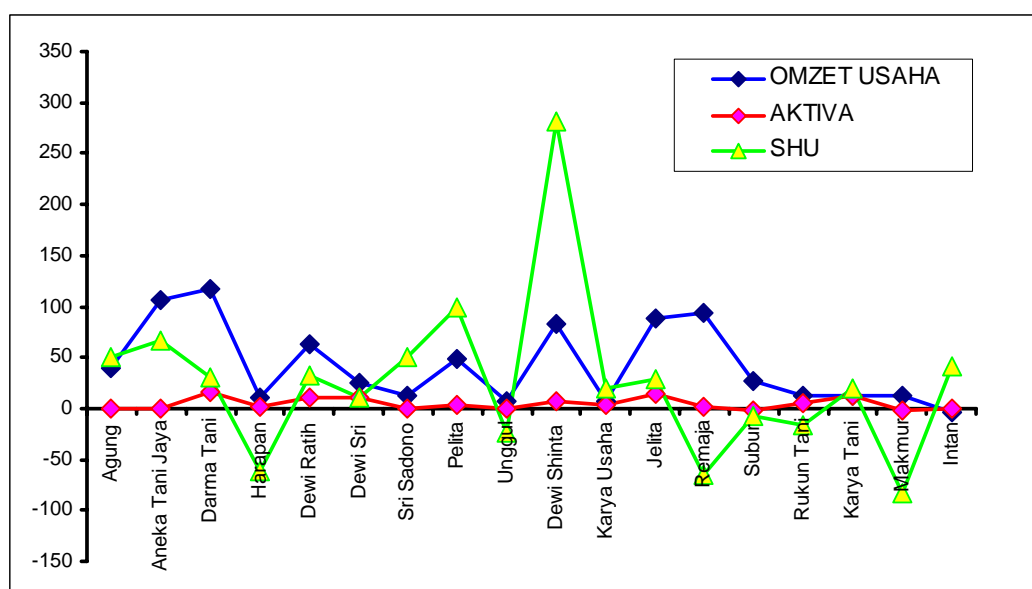
Sumber: data primer 2006

Terlihat dari tabel di atas, sebagian besar sudah menerapkan konsep pendapatan dan beban sesuai dengan PSAK, terbukti dari semua KUD telah menerapkan selisih antara pendapatan dan beban pokok transaksi dengan non anggota diakui sebagai laba atau rugi kotor dengan non anggota, 72,2% menerapkan pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi dengan anggota dan non anggota dicatat sebesar nilai transaksi dalam laporan perhitungan hasil usaha, 83,3% KUD menerapkan pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan non anggota diakui sebagai pendapatan (penjualan) dan 66,7% KUD menerapkan beban usaha dan beban perkoperasian disajikan terpisah dalam laporan

perhitungan hasil usaha, namun hanya 38,9% yang menerapkan pendapatan koperasi yang timbul dari anggota diakui sebesar partisipasi bruto.

#### 4.1.1.2 Perkembangan Usaha

Perkembangan usaha dapat dilihat dari tiga komponen yaitu perkembangan omset usaha, perkembangan aktiva dan perkembangan SHU. Perkembangan dari ketiga komponen dapat dilihat pada lampiran dan pada grafik berikut.



#### 1. Perkembangan Omzet Usaha

Rata-rata perkembangan omset dari 18 KUD di Kabupaten Kendal dari tahun 2004-2005 mencapai 42,23%. Perkembangan paling tinggi mencapai 116,85% pada KUD Darma Tani dan perkembangan paling kecil mencapai -3,94% pada KUD Intan. Lebih lanjut perkembangan omzet usaha dapat dilihat dari distribusi frekuensi berikut.

Tabel 18  
Gambaran Umum Perkembangan Omzet Usaha

Interval	Kriteria	Frekuensi	%
-3.94 - 20.22	Sangat rendah	8	44.4
20.23 - 44.38	Rendah	3	16.7
44.39 - 68.53	Cukup	2	11.1
68.54 - 92.69	Tinggi	2	11.1
92.70 - 116.85	Sangat tinggi	3	16.7
Jumlah		18	100

Terlihat dari tabel di atas terdapat 3 KUD atau 16,7% yang memiliki perkembangan omzet usaha yang sangat tinggi dibandingkan KUD lainnya, terdapat 2 KUD (11,1%) dalam kategori tinggi, 2 KUD (11,1%) tergolong cukup, sebanyak 3 KUD (16,7%) tergolong rendah dan 8 KUD (44,4%) tergolong sangat rendah dibandingkan dengan KUD lainnya. Dari data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar KUD memiliki perkembangan omzet yang sangat rendah.

## 2. Perkembangan Aktiva

Rata-rata perkembangan aktiva dari 18 KUD di Kabupaten Kendal dari tahun 2004-2005 mencapai 4,61%. Perkembangan paling tinggi mencapai 15,84% pada KUD Darma Tani dan perkembangan paling kecil mencapai -2,49% pada KUD Makmur. Lebih lanjut perkembangan aktiva dapat dilihat dari distribusi frekuensi berikut.

Tabel 19  
Gambaran Umum Perkembangan Aktiva

Interval	Kriteria	Frekuensi	%
-2.49 - 1.17	Sangat rendah	8	44.4
1.18 - 4.84	Rendah	3	16.7
4.85 - 8.51	Cukup	2	11.1
8.52 - 12.17	Tinggi	2	11.1
12.18 - 15.84	Sangat tinggi	3	16.7
Jumlah		18	100.0

Terlihat dari tabel di atas terdapat 3 KUD atau 16,7% yang memiliki perkembangan aktiva yang sangat tinggi dibandingkan KUD lainnya, terdapat 2 KUD (11,1%) dalam kategori tinggi, 2 KUD (11,1%) tergolong cukup, 3 KUD (16,7%) tergolong rendah dan 8 KUD (44,4%) tergolong sangat rendah dibandingkan dengan KUD lainnya. Dari data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar KUD memiliki perkembangan aktiva yang sangat rendah.

### 3. Perkembangan SHU

Rata-rata perkembangan SHU dari 18 KUD di Kabupaten Kendal dari tahun 2004-2005 mencapai 26,47%. Perkembangan paling tinggi mencapai 282,07% pada KUD Dewi Shinta dan perkembangan paling kecil mencapai -82,79% pada KUD Makmur. Lebih lanjut perkembangan SHU dapat dilihat dari distribusi frekuensi berikut.

Tabel 20  
Gambaran Umum Perkembangan SHU

Interval	Kriteria	Frekuensi	%
-82,79 - (-9.82)	Sangat rendah	5	27.8
-9.82 - 63.15	Rendah	10	55.6
63.16 - 136.12	Cukup	2	11.1
146.3 - 209.09	Tinggi	0	0.0
209.10 - 282.07	Sangat tinggi	1	5.6
Jumlah		18	100.0

Terlihat dari tabel di atas terdapat 5 KUD atau 27,8% yang memiliki perkembangan SHU yang sangat rendah dibandingkan KUD lainnya, terdapat 10 KUD (55,6%) dalam kategori rendah, 2 KUD (11,1%) tergolong cukup dan 1 KUD (5,6%) tergolong sangat tinggi dibandingkan dengan KUD lainnya. Dari data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar KUD memiliki perkembangan KUD yang tergolong rendah.

Secara umum perkembangan usaha pada KUD di Kabupaten Kendal tergolong sangat rendah. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 21  
Gambaran Umum Perkembangan Usaha

<b>Interval Persentase</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>%</b>
25 - 40	Sangat rendah	5	27.8
41 - 55	Rendah	4	22.2
56 - 70	Cukup	4	22.2
71 - 85	Tinggi	2	11.1
86 - 100	Sangat tinggi	3	16.7
Jumlah		18	100

Terlihat dari tabel di atas, sebanyak 5 KUD (27,8%) memiliki perkembangan usaha yang sangat rendah, 4 KUD (22,2%) dalam kategori rendah, 4 KUD (22,2%) dalam kategori cukup, 2 KUD (11,1%) tergolong tinggi dan 3 KUD (16,7%) dalam kategori sangat tinggi.

#### **4.1.2 Pengujian Hipotesis**

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana. Analisis ini dapat digunakan apabila memenuhi syarat-syarat yaitu berdistribusi normal, model regresi bentuk linier dan tidak mengandung heteroskedastisitas.

##### **4.1.2.1 Uji Prasyarat**

###### **1. Uji Normalitas**

Berdasarkan hasil kenormalan menggunakan uji Kolmogorof Smirnov menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Lebih jelasnya dapat dilihat dari output SPSS sebagai berikut.

Tabel 22  
Hasil Uji Normalitas Data  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Penerapan PSAK	Perkembangan usaha
N		18	18
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	74.2690	56.4815
	Std. Deviation	8.48872	25.49439
Most Extreme Differences	Absolute	.164	.219
	Positive	.164	.219
	Negative	-.093	-.155
Kolmogorov-Smirnov Z		.696	.931
Asymp. Sig. (2-tailed)		.717	.352

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Terlihat dari hasil uji normalitas data diperoleh p value untuk variable pelaksanaan PSAK sebesar 0,717 dan untuk data perkembangan usaha sebesar 0,352. Karena nilai p value > 0,05 menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

## 2. Uji Linieritas

Hasil uji linieritas menunjukkan bahwa model regresi bersifat linier. Lebih jelasnya dapat dilihat dari output SPSS sebagai berikut.

Tabel 23  
Hasil Uji Linieritas

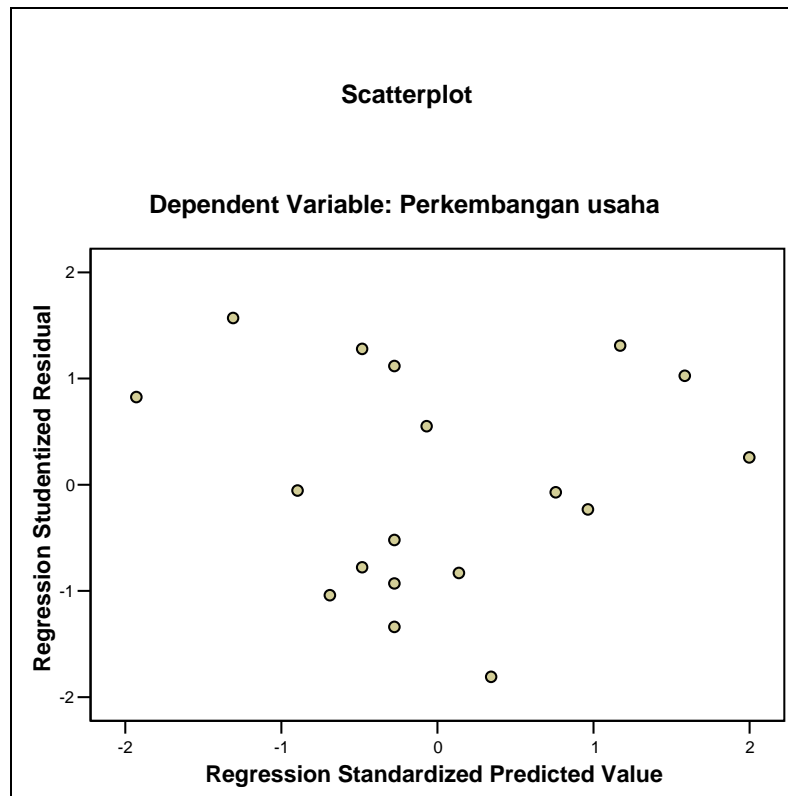
**ANOVA Table**

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Perkembangan usaha *	Between Groups	(Combined)	8740.355	13	672.335	1.165	.486
		Linearity	3995.983	1	3995.983	6.922	.058
		Deviation from Linearity	4744.372	12	395.364	.685	.725
Penerapan PSAK		Within Groups	2309.028	4	577.257		
		Total	11049.383	17			

Terlihat pada tabel di atas, nilai F hitung sebesar 0,685 dengan p value = 0,725. Karena nilai p value > 0,05 dapat disimpulkan bahwa model regresi bersifat linier.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat dari grafik scatter plot sebagai berikut.



Gambar 3  
Scater plot uji heteroskedastisitas

Terlihat dari tabel di atas, ternyata titik-titik tersebar tidak teratur dan berada di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu vertikal yang berarti bahwa model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas.

#### 4.1.2.2 Analisis Regresi

Hasil analisis regresi penerapan PSAK sebagai variabel bebas dan perkembangan usaha sebagai variabel terikat dapat dilihat dari output SPSS sebagai berikut.

Tabel 24  
Hasil Analisis Regresi

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations
		B	Std. Error	Beta			Partial
1	(Constant)	-77.66	44.827		-1.732	.102	
	Penerapan PSAK	1.806	.600	.601	3.011	.008	.601

a. Dependent Variable: Perkembangan usaha

Terlihat dari tabel di atas, diperoleh konstanta sebesar  $-77,657$  dan koefisien variabel pelaksanaan PSAK sebesar  $1,806$ . Koefisien regresi tersebut diuji kebermaknaannya menggunakan uji t diperoleh  $t_{hitung} = 3,011$  dengan p value  $= 0,008$ . Karena p value  $< 0,05$  yang berarti bahwa koefisien regresi tersebut signifikan, yang berarti ada pengaruh yang signifikan pelaksanaan PSAK terhadap perkembangan usaha. Model regresi yang dapat digunakan menyatakan hubungan kedua variabel tersebut:  $Y = -77,657 + 1,806X$ . Dimana X adalah pelaksanaan PSAK dan Y merupakan perkembangan usaha. Model regresi tersebut menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan satu satuan pelaksanaan PSAK akan diikuti perkembangan usaha sebesar  $1,806$ .

Model regresi tersebut juga diuji kebermaknaannya menggunakan uji F seperti pada tabel berikut.

Tabel 20  
Hasil Uji F

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3995.983	1	3995.983	9.065	.008 <sup>a</sup>
	Residual	7053.400	16	440.837		
	Total	11049.383	17			

a. Predictors: (Constant), Penerapan PSAK

b. Dependent Variable: Perkembangan usaha

Terlihat dari tabel di atas, diperoleh F hitung sebesar 9,065 dengan p value = 0,008. Karena nilai p value < 0,05 yang berarti bahwa model regresi tersebut signifikan. Dari hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan PSAK berpengaruh positif terhadap perkembangan usaha pada KUD di Kabupaten Kendal.

Besarnya kontribusi penerapan PSAK terhadap perkembangan usaha dapat dilihat dari koefisien determinasi seperti pada tabel 21.

Tabel 25  
Koefisien Determinasi

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Change Statistics				Durbin-Watson
				F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.601 <sup>a</sup>	.362	.322	9.065	1	16	.008	2.221

a. Predictors: (Constant), Penerapan PSAK

b. Dependent Variable: Perkembangan usaha

Terlihat dari tabel 21, nilai R-square sebesar 0,362 yang berarti bahwa kontribusi penerapan PSAK terhadap perkembangan usaha sebesar 36,2%.

## 4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan ada pengaruh penerapan standar akuntansi keuangan no 27 tentang akuntansi koperasi terhadap perkembangan usaha pada KUD di Kabupaten Kendal diterima. Hal ini dibuktikan dari hasil analisis regresi dengan p value = 0,008 < 0,05. Dari hasil analisis regresi diperoleh model regresi yang menyatakan pengaruh penerapan PSAK terhadap perkembangan usaha yaitu:

$$Y = -77,657 + 1,806X$$

Model tersebut menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan kualitas penerapan PSAK pada KUD sebesar 1% akan diikuti dengan kenaikan perkembangan usaha sebesar 1,806%.

Berdasarkan data yang diperoleh, ternyata 66,7% telah menerapkan PSAK No 27 secara baik bahkan 27,8% telah menerapkan dengan kualitas yang sangat baik. Hal ini berarti bahwa KUD di Kabupaten Kendal telah menerapkan konsep penyusunan laporan keuangan, konsep aktiva, konsep kewajiban, konsep ekuitas, konsep pendapatan dan beban dengan baik.

Dengan penyusunan laporan keuangan yang baik mencerminkan bahwa kinerja organisasi dan manajemennya sudah baik. Akuntansi merupakan suatu proses pencatatan dan pengolahan data-data keuangan sehingga laporan keuangan yang berguna bagi si pemakai untuk pengambilan keputusan ekonomisnya. Dalam hal ini akuntansi berperan dalam penyediaan informasi keuangan organisasi, dimana informasi tersebut dapat berfungsi sebagai media pertanggungjawaban dan sekaligus dapat untuk menilai kinerja organisasi dan manajemen. Manajemen yang baik akan selalu berusaha meningkatkan usahanya, yang akhirnya bermuara pada perkembangan usaha yang semakin meningkat.

Koperasi sebagai badan usaha yang dimiliki oleh masyarakat (terutama anggotanya) harus menerapkan *good governance* sesuai dengan tuntutan yang berkembang di masyarakat. Untuk itu akuntabilitas koperasi, sebagai komponen utama *good governance*. Koperasi harus dijadikan dasar bagi upaya penataan kelembagaan dan pengembangan usahanya. Adanya akuntabilitas yang baik akan

meningkatkan partisipasi anggota, karena masyarakat / anggota lebih mampu memprediksi kinerja koperasi sekaligus merasakan adanya transparansi dalam pengelolaan kegiatan usahanya.

Peningkatan akuntabilitas koperasi diharapkan mampu mendorong koperasi untuk berusaha secara efisien dalam memenuhi kebutuhan para anggota dan masyarakat dalam kegiatan usahanya. Dalam rangka pengembangan akuntabilitas koperasi, maka perlu ada suatu pedoman pelaksanaan peningkatan akuntabilitas di kalangan koperasi. Faktor akuntabilitas yang perlu dipertimbangkan dalam rangka penataan kelembagaan usaha koperasi dengan berpedoman pada prinsip-prinsip koperasi yaitu : 1) prinsip anggota sukarela terbuka, 2) Prinsip pengendalian oleh anggota secara demokratis, 3) Prinsip otonomi dan kebebasan, 4) Prinsip pendidikan, pelatihan dan informasi, 5) Prinsip partisipasi dan ekonomi anggota, 6) Prinsip kerjasama diantara koperasi-koperasi, 7) Prinsip kepedulian terhadap komunitas.

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap organisasi koperasi dalam penerapan akuntabilitas kinerjanya sehingga terbentuk suatu pola penataan kelembagaan dan pengembangan usaha koperasi yang mengacu pada prinsip-prinsip akuntabilitas (Depkop 2-3:2002).

Penyusunan laporan keuangan pada koperasi harus berdata dan berfakta benar hanya dapat terwujud kalau pihak pembuat laporan tersebut berhati jujur, tulus dan mengerti manfaat dari adanya laporan tersebut, bagi kebenaran/keberesan administrasi, perkembangan usaha dan perkembangan

organisasi koperasi. Laporan yang berdata dan berfakta benar mungkin mungkin akan memberi manfaat pula kepada pembuatnya, seperti adanya bantuan, perhatian, perbaikan dari pihak dari pihak penerima laporan (pengurus) setelah mengetahui adanya kesulitan, kekurangan sarana, kemacetan, dan penyebabnya yang menimpa usaha yang sedang ditangani dari pemberi laporan, sebaliknya laporan yang dibuat-buat atau berdata dan berfakta tidak benar bahkan dapat mencelakakan pembuat laporan mengingat adanya pengawasan-pengawasan dalam setiap kegiatan.

Menurut Siagian penyusunan laporan dapat dikatakan baik apabila terdapat sepuluh persyaratan dalam laporan, yaitu: 1) tersusun dengan rapi, 2) disusun dalam bahasa yang sederhana, mudah dipahami, 3) disusun dengan kerjasama antar petugas-petugas teknis dan petugas-petugas operasional, 4) mengandung semua fakta yang dibutuhkan dalam menghadapi situasi tertentu, 5) data yang terkandung didalamnya bersifat up to date, dapat dipercaya, dan lengkap, 6) sumber data merupakan sumber yang kompeten, 7) berisikan alat-alat visualisasi, 8) mudah diinterpretasikan oleh pihak lain yang tidak turut menyusun laporan, 9) mudah digunakan oleh pimpinan organisasi dalam proses pengambilan keputusan dan 10) disampaikan kepada yang memerlukannya pada waktu yang tepat (Kartasapoetra 1992:74).

Menurut Indrawidjaja memberikan penjelasan mengenai ketujuh ciri-ciri laporan yang baik, mantap, dan efektif, sebagai berikut: 1) Laporan benar dan obyektif, 2) Laporan jelas dan cermat, 3) Laporan langsung mengenai sasaran, 4)

Laporan harus lengkap, 5) Laporan harus konsisten, 6) Laporan tepat pada waktunya, dan 7) Laporan tepat pada penerimanya.

Ciri-ciri laporan yang baik tersebut perlu menjadi pedoman bagi manager dalam penyusunan laporan keuangan dan diharapkan bidang usaha yang dipertanggungjawabkan dapat berkembang tanpa menghadapi kendala. Berkembangnya koperasi dengan bidang usahanya tidak lepas dari aktivitas manager dalam memberikan informasi-informasi yang benar dalam bentuk laporan keuangan (Kartasapoetra 75-76:1992).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain:

1. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Koperasi No. 27 pada KUD di Kabupaten Kendal sudah baik. Dari 18 KUD yang diteliti sebanyak 66,7% dalam kategori baik dan 27,8% dalam kategori sangat baik.
2. Perkembangan usaha pada KUD di Kabupaten Kendal tahun 2004-2005 masih rendah, terbukti dari 27,8% KUD memiliki perkembangan usaha yang sangat rendah dan 22,2% rendah, sebanyak 22,2% cukup, hanya 11,1% yang memiliki perkembangan usaha tinggi dan 16,7% dalam kategori tinggi.
3. Hasil perhitungan penerapan PSAK No. 27 dengan uji F diperoleh p value =  $0.008 < 0.05$ , hal ini membuktikan bahwa PSAK No. 27 tentang Akuntansi Koperasi berpengaruh terhadap perkembangan usaha pada KUD di Kabupaten Kendal

#### **5.2 Saran**

1. Menyadari bahwa penerapan PSAK No. 27 tentang Akuntansi Koperasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan perkembangan usaha, maka KUD di Kabupaten Kendal yang belum menerapkan PSAK No. 27 tentang Akuntansi Koperasi dalam penyusunan

laporan keuangannya hendaknya dapat segera menerapkan sehingga perkembangan usaha akan dapat meningkat sesuai dengan harapan semua pihak.

2. Diharapkan untuk KUD di Kabupaten Kendal yang sudah menerapkan PSAK No. 27 tentang Akuntansi Koperasi hendaknya untuk terus konsisten dalam penyusunan laporan keuangan yang sudah sesuai, sehingga perkembangan usaha dapat lebih meningkat.
3. Bagi peneliti lainnya untuk melakukan penelitian dengan menambah variabel lainnya seperti pengelolaan internal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anis, C. dan Imam, G. 2000. *Teori Akuntansi*. Semarang: Penerbit Dosen Fakultas Ekonomi UNDIP
- Depkop Pengusaha Kecil dan Menengah. 1998. *Petunjuk Standar Khusus Akuntansi Koperasi*. Jakarta: Dirjen Binkopkot
- G Kartasapoetra.1992. *Praktek Pengelolaan Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hiro, T. 1996. *Akuntansi Untuk Badan Usaha Koperasi*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2002. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat (PT Salemba Emban Patria).
- Muhammad, A. 2002. *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Ninik, W. dan Sunindhia. 2003. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Nuerwyndho. 1987. *Peternakan Sapi Perah Rakyat di Nongkojajar*. dalam : Sri Edi Swasono (Ed). *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*. Jakarta : UI Press
- Sofyan, S. H. 2003. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Sonny, S. 2003. *Manajemen Koperasi Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Sudjana. 1992. *Metoda Statistika*. Bandung
- Suharsimi, A. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.

Sukoco, Wahyu. 1985. *Manajemen Koperasi*. Makasar: Pusdikop.

Woelan Azis, Sri, SH. *Aspek-aspek Hukum BUUD/KUD Dalam Gerak  
Pelaksanaannya*. Alumni Bandung

Yulianto, Sarno. 1994. *Dasar-dasar Akuntansi*. Surakarta: Widya Duta.

## Lampiran 1

**IDENTITAS RESPONDEN**

Nama :  
 Tempat Kerja :  
 Jabatan dalam Koperasi :

**I. ITEM PENERAPAN PSAK NO. 27 TENTANG AKUNTANSI KOPERASI**

Petunjuk : Berikan tanda (V) pada kolom jawaban yang sesuai !

**A. Konsep Penyusunan Laporan Keuangan**

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1.	Apakah laporan keuangan pada KUD Anda, sudah menyajikan neraca ?		
2.	Apakah laporan keuangan pada KUD Anda, sudah menyajikan perhitungan hasil usaha ?		
3.	Apakah laporan keuangan pada KUD Anda, sudah menyajikan laporan arus kas ?		
4.	Apakah laporan keuangan pada KUD Anda, sudah menyajikan laporan promosi ekonomi anggota ?		
5.	Apakah laporan keuangan pada KUD Anda, sudah menyajikan catatan atas laporan keuangan ?		
6.	Apakah neraca pada KUD Anda, sudah disajikan dengan tepat waktu pada tanggal yang sudah ditentukan ?		
7.	Apakah neraca pada KUD Anda, sudah menyajikan informasi mengenai aktiva sesuai dengan PSAK Koperasi?		
8.	Apakah neraca pada KUD Anda, sudah menyajikan informasi mengenai kewajiban sesuai dengan PSAK Koperasi ?		
9.	Apakah neraca pada KUD Anda, sudah menyajikan informasi mengenai ekuitas sesuai dengan PSAK Koperasi?		
10.	Apakah perhitungan hasil usaha pada KUD Anda, sudah memuat laba atau rugi kotor dari non-anggota ?		

11.	Apakah laporan perhitungan hasil usaha pada KUD Anda, sudah memisahkan pos penghasilan yang berasal dari anggota dan non-anggota ?		
13.	Apakah laporan arus kas pada KUD Anda, sudah meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas, saldo akhir kas pada periode tertentu ?		
14.	Apakah laporan arus kas pada KUD Anda, sudah melaporkan secara tepat waktu selama periode tertentu ?		
15.	Dalam hal SHU tahun berjalan belum dibagi, apakah manfaat ekonomi yang diperoleh anggota dari pembagian SHU pada akhir tahun buku, Anda catat sebesar taksiran jumlah SHU yang akan dibagi untuk anggota ?		
16.	Apakah catatan atas laporan keuangan pada KUD Anda, meliputi pengungkapan, pengukuran, penyajian, dan pengakuan dari aktiva ?		
17.	Apakah catatan atas laporan keuangan pada KUD Anda, meliputi pengungkapan, pengukuran, penyajian, dan pengakuan dari kewajiban ?		
18.	Apakah catatan atas laporan keuangan pada KUD Anda, meliputi pengungkapan, pengukuran, penyajian, dan pengakuan dari ekuitas ?		
19.	Apakah catatan atas laporan keuangan pada KUD Anda, meliputi pengungkapan, pengukuran, penyajian, dan pengakuan dari pendapatan dan beban ?		

## B. Konsep Aktiva

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1.	Aktiva yang diperoleh dari sumbangan yang terikat penggunaannya dan tidak dapat dijual untuk menutup kerugian pada Koperasi, apakah pada KUD Anda diakui sebagai aktiva lain-lain ?		
2.	Apakah aktiva yang diperoleh dari sumbangan yang terikat penggunaannya, anda jelaskan dalam catatan atas laporan keuangan ?		
3.	Apakah pada koperasi Anda, aktiva-aktiva yang dikelola oleh koperasi, tetapi bukan milik koperasi tidak diakui sebagai aktiva ?		
4.	Apakah aktiva-aktiva yang dikelola oleh koperasi , tetapi bukan milik koperasi, Anda jelaskan dalam catatan atas laporan keuangan ?		
5.	Apakah aktiva pada KUD Anda, sudah dipisahkan antara aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap dan aktiva lain-lain ?		
6.	Apakah dalam KUD Anda, sudah ada pemisahan piutang pinjaman anggota dan non-anggota ?		
7.	Apakah aktiva yang dimiliki oleh KUD, Anda cantumkan secara terperinci ?		

### C. Konsep Kewajiban

<b>No</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>
1.	Pada KUD Anda, apakah ada pemisahan hutang simpanan anggota dan non-anggota ?		
2.	Apakah simpanan anggota yang tidak berkarakteristik sebagai ekuitas, Anda akui sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang sesuai dengan tanggal jatuh tempo ?		
3.	Apakah pada KUD Anda, Simpanan anggota yang tidak berkarakteristik sebagai ekuitas, apakah Anda catat sebesar nilai nominalnya ?		
4.	Apakah Anda mencantumkan secara terperinci kewajiban yang dimiliki oleh KUD ?		

**Konsep Ekuitas**

<b>No</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>
1.	Apakah simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain dari anggota yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib, Anda akui sebagai ekuitas koperasi ?		
2.	Apakah simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain dari anggota yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib, Anda catat sebesar nilai nominalnya ?		
3.	Apakah simpanan pokok yang belum diterima dari anggota, Anda sajikan sebagai piutang simpanan pokok ?		
4.	Apakah simpanan wajib yang belum diterima dari anggota, Anda sajikan sebagai piutang simpanan wajib ?		
5.	Apakah kelebihan setoran simpanan pokok anggota baru di atas nilai nominal simpanan pokok anggota pendiri, Anda akui sebagai modal penyetaraan partisipasi anggota ?		
6.	Apakah kelebihan setoran simpanan wajib anggota baru di atas nilai nominal simpanan wajib anggota pendiri, Anda akui sebagai modal penyetaraan partisipasi anggota ?		
7.	Apakah modal penyertaan yang berupa uang atau barang yang ditanamkan oleh pemodal untuk meningkatkan usaha koperasi, Anda akui sebagai ekuitas ?		
8.	Apakah modal penyertaan, Anda catat sebesar jumlah nilai nominal setoran ?		
9.	Apakah modal penyertaan yang diterima selain uang tunai, Anda catat sebesar harga pasar yang berlaku pada saat diterima ?		
10.	Apakah ketentuan mengenai perjanjian dengan pemodal yang menyangkut pembagian keuntungan atau hasil usaha, tanggungan kerugian, jangka waktu dan hak-hak pemodal, Anda jelaskan dalam catatan atas laporan keuangan ?		

11.	Apakah modal sumbangan yang diterima oleh koperasi yang dapat menutup resiko kerugian, Anda akui sebagai ekuitas ?		
12.	Apakah modal sumbangan yang tujuannya merupakan pinjaman, Anda akui sebagai kewajiban jangka panjang ?		
13.	Apakah modal sumbangan yang tujuannya merupakan pinjaman, Anda jelaskan dalam catatan atas laporan keuangan ?		
14.	Apakah Anda menyisihkan sebagian dari Sisa Hasil Usaha sebagai cadangan ?		
15.	Apakah cadangan dan tujuan penggunaannya, Anda jelaskan dalam catatan atas laporan keuangan ?		
16.	Apakah pembayaran tambahan kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi diatas jumlah simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain-lain, Anda bebaskan pada cadangan ?		
17.	Apakah SHU tahun berjalan, Anda bagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada koperasi ?		
18.	Dalam hal jenis dan jumlah pembagian hasil usaha telah diatur secara jelas, maka bagian yang menjadi hak koperasi, apakah Anda akui sebagai kewajiban ?		
19.	Apakah SHU yang pembagiannya belum diatur secara jelas, Anda catat sebagai SHU belum dibagi ?		
20.	Apakah SHU yang pembagiannya belum diatur secara jelas, Anda jelaskan dalam catatan atas laporan keuangan?		
21.	Apakah SHU belum dibagi pada KUD Anda, sudah dipisahkan untuk anggota dan non- anggota ?		

#### D. Konsep Pendapatan dan Beban

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1.	Apakah pendapatan koperasi yang timbul dari anggota, Anda akui sebesar partisipasi bruto ?		
2.	Apakah pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan non-anggota, Anda akui sebagai pendapatan (penjualan) ?		
3.	Apakah pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi dengan anggota dan non-anggota, Anda laporkan terpisah dalam laporan perhitungan hasil usaha ?		
4.	Dalam pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi dengan anggota dan non-anggota, Anda catat sebesar nilai transaksi dalam laporan perhitungan hasil usaha ?		
5.	Apakah selisih antara pendapatan dan beban pokok transaksi dengan non-anggota, Anda akui sebagai laba atau rugi kotor dengan non-anggota ?		
6.	Apakah beban usaha dan beban perkoperasian, Anda sajikan terpisah dalam laporan perhitungan hasil usaha ?		

#### II. ITEM PERKEMBANGAN USAHA

No	Faktor-Faktor	Tahun 2004	Tahun 2005
1.	Omzet Usaha		
2.	Aktiva		
3.	Sisa Hasil Usaha (SHU)		